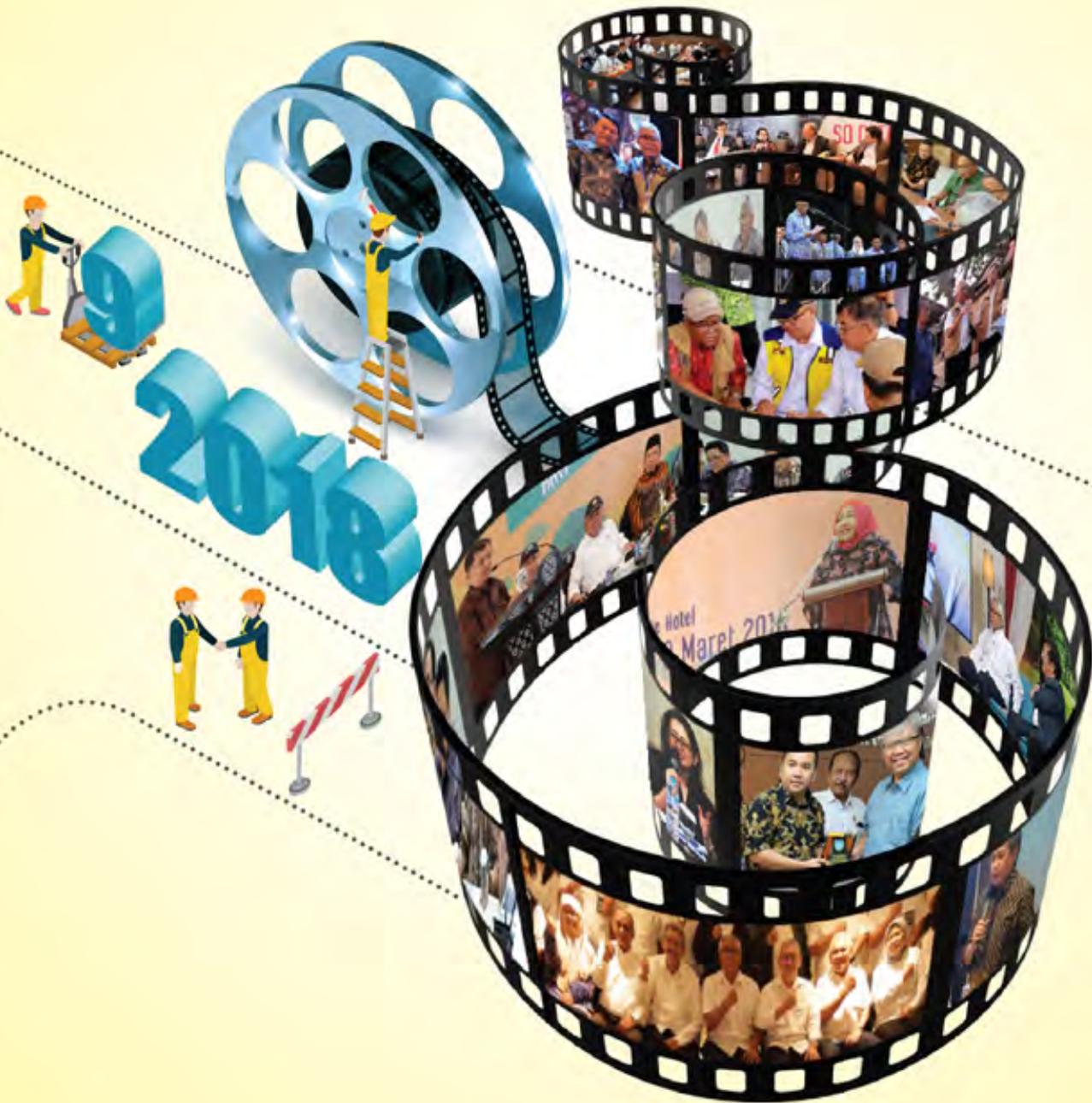


SINERGI

Buletin Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Edisi 36/Desember 2018



**Kepercayaan Datang, Produk
Berkualitas Terus Dihasilkan**
Kaleidoskop BPIW 2018



BPIW • Kementerian PUPR



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbpw@gmail.com

Telp. +6221-2751 5804



Salam Sinergi

Pembaca yang terhormat, Buletin Sinergi edisi 36 ini merupakan edisi akhir tahun, di mana hanya beberapa rubrik saja yang ditampilkan. Pada Rubrik Kabar Utama pada edisi ini membahas mengenai kegiatan dan produk yang sudah dilakukan BPIW sepanjang 2018 dan akan dilakukan di 2019. Rubrik ini juga berisi komentar-komentar para ahli pengembangan wilayah dan juga para mantan Kepala BPIW. Mereka memberikan beberapa masukan terkait tugas dan fungsi BPIW.

Beberapa capaian di 2018, dihadirkan dalam bentuk infografis. Rangkaian kegiatan BPIW selama 2018 dirangkum dalam Kaleidoskop akhir tahun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Kaleidoskop tahun ini menampilkan tema-tema kegiatan BPIW, seperti pelaksanaan program BPIW, *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP), dan dukungan program untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dokumentasi selama 2018 ditampilkan dalam rubrik Potret.

Kami berharap Buletin Sinergi edisi kali ini dapat memenuhi harapan pembaca yang budiman serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Salam hormat,

Pemimpin Redaksi

SINERGI

BULETIN BPIW

Tim Penyusun:

Pelindung:

Hadi Sucahyono

Pengarah:

Firman Hatorangan Napitupulu

Penasehat

Bobby Prabowo

Iwan Nurwanto

Kuswardono

Agusta Ersada Sinulingga

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:

P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:

Shovich

Editor :

Hendra Djamal

Mutri Batul Aini

Tim Pembuat Artikel:

Indira Dwi Kusumatuti

Daris Anugrah

Sekretariat:

Untung Priyono

Nur Wahyu

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)
Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110

Email: humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id

Website: bpiw.pu.go.id

No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:

humasbpiw@gmail.com, humasbpiw@pu.go.id

Design : Heri Hito

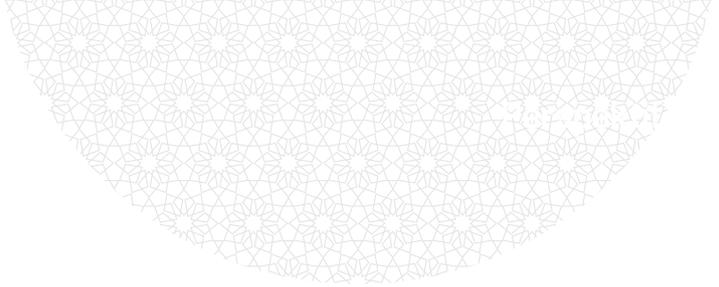
Infografis, layout & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi



04

Kabar Utama:

Kepercayaan Datang, Produk Berkualitas
Terus Dihasilkan



Edisi 36/Desember 2018

daftar isi



09

Komentar Pakar

14

Kaleidoskop BPIW 2018



56

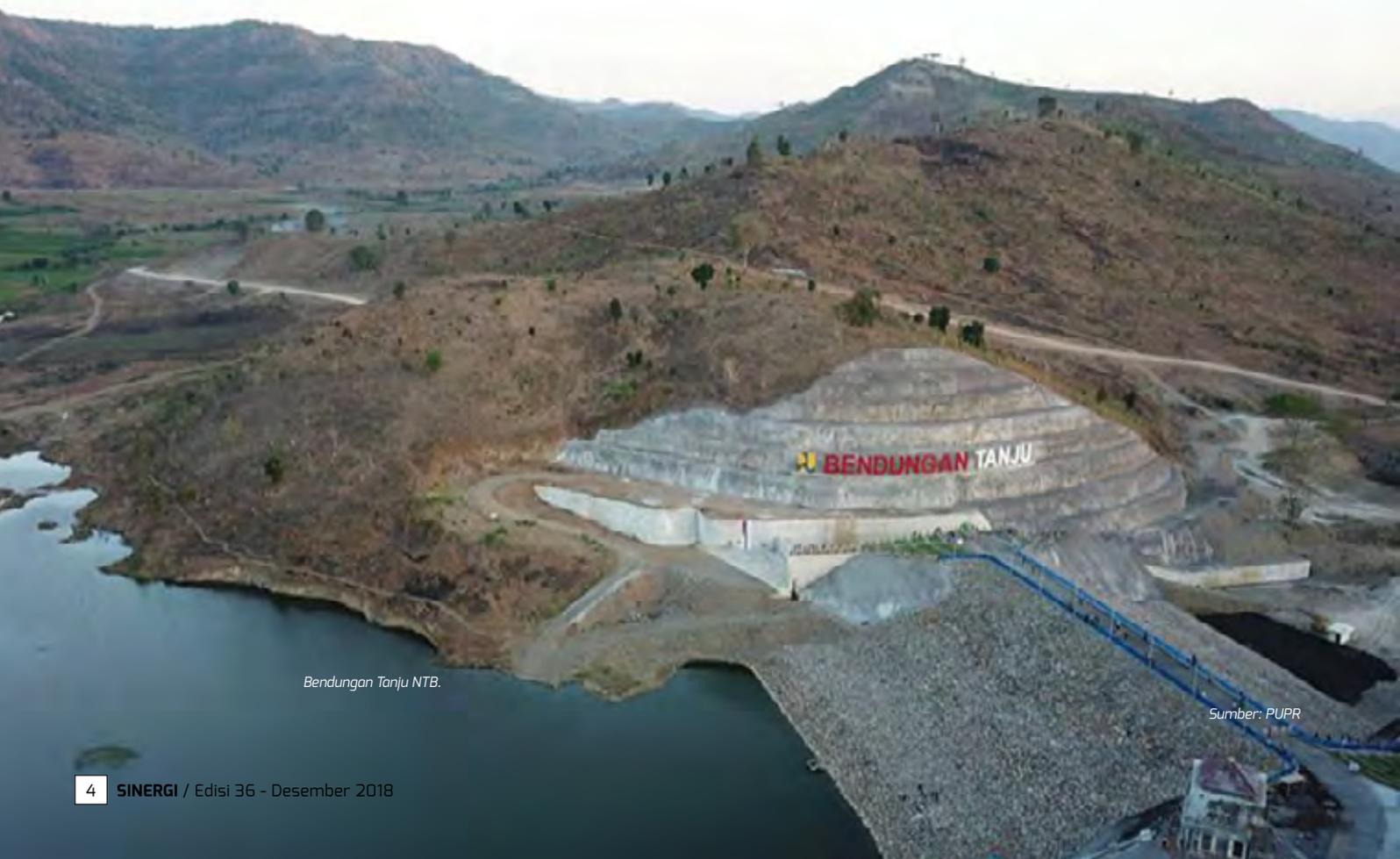
Beberapa Kegiatan Strategis BPIW 2018

60

Potret:
Rangkaian Acara Harbak PU di Gedung Sate

Kepercayaan Datang, Produk Berkualitas Terus Dihasilkan

Sejak awal Januari hingga di penghujung tahun 2018, banyak kegiatan yang telah dilakukan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bukan sekedar kegiatan rutin, namun kini BPIW telah diberikan kepercayaan dari Menteri PUPR dan juga pemerintah pusat untuk tugas-tugas tertentu, seperti penyusunan rencana tapak relokasi hunian pasca gempa di Palu dan sekitarnya dan penyusunan Integrated Tourism Masterplan (ITMP). Tugas-tugas yang dihadapi BPIW ke depan semakin banyak. Untuk itu BPIW melakukan perkuatan sumber daya manusia (SDM) profesional yang dimilikinya, sehingga dapat terus menghasilkan produk-produk yang berkualitas.



Bendungan Tanju NTB.

Sumber: PUPR

INTEGRASI PERENCANAAN: INFRASTRUKTUR PUPR DAN KAWASAN STRATEGIS PRIORITAS NASIONAL



- Kementerian PUPR c.q BPIW mempunyai peran strategis dalam **menerpadukan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah** melalui pengembangan kebijakan dan strategi perencanaan (*planning*) dan sinkronisasi program (*programming*) infrastruktur PUPR
- Kementerian PUPR c.q BPIW **menerpadukan pembangunan infrastruktur PUPR seperti infrastruktur BM, SDA, CK, dan PnP dengan prioritas nasional sektor lain dan kawasan**, seperti intermoda pelabuhan, bandar udara, serta dengan pengembangan kawasan seperti KEK, KI, KSPN.
- Kementerian PUPR c.q BPIW berperan dalam **mengendalikan pengembangan infrastruktur wilayah** di Indonesia, baik antarsektor, antarwilayah, maupun antartingkat pemerintahan

Seluruh unit kerja di BPIW telah melaksanakan kegiatan secara maksimal di 2018, sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) masing-masing. Kepala BPIW Hadi Sucahyono menjelaskan di Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR telah dilakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) dan melakukan kajian mengenai analisis manfaat program Kementerian PUPR.

Selain itu rencana induk per pulau dilakukan penajaman. Kemudian Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR secara rutin melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg). Namun kedepan menurut Hadi pusat tersebut mulai terlibat pada bantuan-bantuan luar negeri. Sehingga pembangunan tidak hanya dibiayai melalui APBN saja.

Selanjutnya Pusat Pengembangan Strategis telah mengawal kegiatan strategis yakni penyusunan ITMP di tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (Lombok). "Dalam ITMP, tugas kita sebagai *executing agency* atau sebagai koordinator untuk penyiapan studi dan fisik infrastruktur yang akan dibangun," ujar Hadi, 26 Desember lalu.

BPIW diberi kepercayaan menyusun ITMP dengan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata

dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BPIW telah mengawal penyusunan ITMP ini, sejak proses lelang internasional yang diikuti puluhan konsultan dalam dan luar negeri.

Jadi untuk pertama kalinya Kementerian PUPR melalui BPIW menjadi koordinator ITMP untuk mendukung kegiatan fisik dan non fisik untuk pengembangan pariwisata terpadu. Menurut Hadi penyusunan ITMP merupakan kepercayaan dari pemerintah kepada BPIW yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga untuk pertama kalinya pemerintah membuat ITMP dengan melibatkan berbagai kementerian terkait.

"ITMP yang kita susun akan menjadi model *masterplan* untuk pengembangan pariwisata, untuk itu perlu ada pengawalan baik dari sisi substansi dan *networking*. Diharapkan dengan ITMP yang kita susun ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia," ucap Hadi.

Sedangkan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan telah ikut membuat *masterplan* atau rencana induk Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/

Untuk pertama kalinya Kementerian PUPR melalui BPIW menjadi koordinator ITMP untuk mendukung kegiatan fisik dan non fisik untuk pengembangan pariwisata terpadu. Kemudian juga untuk pertama kalinya pemerintah membuat ITMP dengan melibatkan berbagai kementerian terkait.

BPIW juga terlibat langsung dalam penanganan pasca bencana di Palu dan sekitarnya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mempercayakan kepada BPIW untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama Kementerian/ Lembaga terkait.

Bappenas). Kemudian, *masterplan* pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara di Wini, Motamasin, dan Skouw yang telah dibuat pusat tersebut. *Masterplan* yang dibuat itu telah diminta Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara sebagai contoh model penyusunan *masterplan* terkait hal itu.

Tidak hanya itu, BPIW juga terlibat langsung dalam penanganan pasca bencana di Palu dan sekitarnya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mempercayakan kepada BPIW untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama Kementerian/ Lembaga terkait.

Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas.

Selain itu akan ada tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit.

Kedepan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Tause dan Tondo yang ada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena gempa, tsunami, dan likuifaksi.

Relokasi juga direncanakan untuk penduduk yang berada di daerah sesar atau patahan dan rumah yang mengalami rusak berat. Status tanah di empat kawasan itu merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini sudah dikonsultasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi tersebut. Rencana relokasi itu dikuatkan dengan hasil kajian tanah dan geologi dari Badan Geologi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain dengan Badan Geologi, BPIW juga melakukan koordinasi dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Deputi Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Deputi Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Kerja sama juga dilakukan dengan pemerintah daerah setempat dan negara Jepang yakni





Pembahasan KPPN

Sumber: BPIW

dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Kemudian, BPIW turut andil dalam menyusun *masterplan* dan Pradesain yang akan menjadi arah pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Ada enam KPPN yang disusun BPIW yakni KPPN Konawe Selatan, Bengkayang, Lombok Tengah, Muna Barat, Boalemo, dan KPPN Ngada. KPPN ini juga telah disusun di 2017 dan 2016.

Tujuan dari KPPN adalah mewujudkan kemandirian dan menciptakan desa mandiri berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta keterkaitan kegiatan ekonomi desa-kota.

BPIW telah banyak menghasilkan *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) seperti MPDP 35 WPS dan MPDP Kawasan strategis seperti Kawasan Cikarang Bekasi Laut (CBL), Kawasan Strategis Pariwisata Pantai (Tanjung Kelayang, Morotai, Tanjung Lesung, Raja Ampat dan Wakatobi) dan Labuan Bajo serta Patimban.

Pada 2018, BPIW tengah menyiapkan Program Pengembangan Perkotaan Nasional atau *National Urban Development Program* (NUDP). Program tersebut mendapat bantuan dari Bank Dunia dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan tersebut masih akan dilakukan pada 2019.

Pembangunan infrastruktur sektor PUPR yang berbasis 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) kedepan akan dilakukan *updating*. Menurut Hadi, seluruh WPS yang ada akan ditinjau kembali, apakah akan diperbanyak atau justru dikurangi. Hal ini

perlu dilakukan mengingat perkembangan zaman yang semakin berkembang.

SDM Lintas Unit Kerja dan Para Ahli Pengembangan Wilayah Dilibatkan Untuk Menghasilkan Produk yang Lebih Berkualitas

Semakin banyaknya tugas yang harus dilakukan maka Hadi menghimpun seluruh SDM lintas unit kerja. Dengan kerja sama antar lintas unit kerja yang ada di empat pusat dan sekretariat BPIW Hadi optimis pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada BPIW dapat dilaksanakan dengan optimal. "BPIW memiliki banyak SDM dari disiplin ilmu yang berbeda-beda seperti geologi, planologi, dan arsitektur. Kita bentuk tim lintas unit kerja dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda tersebut. Dengan demikian diharapkan produk yang dihasilkan lebih berkualitas," ujar Hadi.

Tidak hanya itu, Hadi beserta jajarannya melakukan silaturahmi dengan para ahli pengembangan wilayah, 10 Desember 2018 lalu. Dari beberapa ahli pengembangan wilayah yang diundang, dua diantaranya merupakan mantan Kepala BPIW, yakni Hermanto Dardak dan Rido Matari Ichwan.

Tidak hanya bersilaturahmi, Hadi juga mengajak para ahli tersebut untuk berkontribusi dengan menyumbangkan keahliannya lewat produk yang dihasilkan BPIW seperti *policy brief* atau masukan yang diberikan kepada Menteri PUPR terkait kebijakan-kebijakan yang ada.

Policy brief tersebut terkait isu-isu strategis seperti pengaruh pengembangan jalan tol terhadap Pantura (Pantai Utara), rencana pengembangan Jabar Selatan, arah pengembangan Batam Bintan, Kota Baru Maja,

"BPIW memiliki banyak SDM dari disiplin ilmu yang berbeda-beda seperti geologi, planologi, dan arsitektur. Kita bentuk tim lintas unit kerja dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda tersebut. Dengan demikian diharapkan produk yang dihasilkan lebih berkualitas," ujar Hadi.



Labuhan Bajo

Sumber: BPIW

dan pembangunan Papua. Mantan Kepala BPIW periode 2015-2016, Hermanto Dardak menyambut baik dilibatkannya dirinya dan para ahli pengembangan wilayah terkait *policy briefs* ini, karena hal itu sangat baik bila sesuatu dilakukan secara bersama-sama. Contohnya terkait pengembangan kawasan pariwisata. Semua sektor ikut berkontribusi, sehingga tercipta sebuah keterpaduan program. “Oleh karenanya saya dan teman-teman sangat mendukung kebijakan Kepala BPIW dan kami siap mendukung program-program yang dilaksanakan BPIW,” ucap Dardak.

Ia juga menilai tantangan yang perlu dihadapi BPIW adalah terkait koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dan juga dengan kementerian/lembaga lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar produk-produk yang dihasilkan seperti MPDP dapat dimanfaatkan dengan baik.

Selain itu menurutnya dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan, maka menjadi tantangan bagi BPIW dalam mengembangkan kawasan perkotaan dengan berbasis pengembangan wilayah. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat tema-tema yang menjadi potensi yang dapat dikembangkan di suatu kota.

Tantangan lain adalah meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM yang ada di BPIW menurut Dardak harus dibangun

dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki rasa memiliki terhadap BPIW yang tinggi, sehingga produk-produk yang dihasilkan lebih berkualitas.

“Kita harus menyadari bahwa BPIW ini sangat terkait dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Kementerian PUPR. Sehingga *capacity building* yang diberikan kepada para pemangku kepentingan itu menjadi hal yang penting. Tentunya penekanan untuk pengembangan SDM bisa difokuskan untuk meningkatkan *capacity building* tersebut,” tutur Dardak.

Ia berharap kedepan *outcome* dan *impact* dari perencanaan dan pemrograman yang dibuat BPIW dapat cepat terwujud. Sehingga Indonesia memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain terutama negara-negara di Asia Tenggara.

Selain itu perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR yang dibuat BPIW diharapkan dapat menjawab isu-isu pengembangan wilayah, seperti isu mengenai disparitas antar wilayah, lingkungan, dan perekonomian masyarakat. Sehingga dapat diketahui penanganan seperti apa yang akan dilakukan Kementerian PUPR terhadap isu-isu tersebut. **(Redaksi)**

“BPIW memiliki banyak SDM dari disiplin ilmu yang berbeda-beda seperti geologi, planologi, dan arsitektur. Kita bentuk tim lintas unit kerja dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda tersebut. Dengan demikian diharapkan produk yang dihasilkan lebih berkualitas,” ujar Hadi.

Komentar Pakar

Kegiatan yang telah dilakukan BPIW mendapat tanggapan para pakar, baik dari pakar pengembangan wilayah hingga para mantan pimpinan BPIW. Bagaimana pandangan mereka terhadap 'sepak terjang' BPIW selama ini terutama di 2018?, berikut rangkuman pendapat mereka.



Rido Matari Ichwan

Kepala BPIW 2016-2017/ Pakar Pengembangan Wilayah, Widyaiswara Kementerian PUPR

Perlu Pedoman Penyusunan MPDP

(Dikutip dari pertemuan jajaran pimpinan BPIW dengan para pakar pengembangan wilayah pada 10 Desember 2018)

Selama ini BPIW telah menghasilkan banyak *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP). Menurut saya perlu adanya pedoman penyusunan MPDP. Dengan adanya pedoman, maka akan mempermudah penyusunan MPDP. BPIW dan Widyaiswara dapat melakukan kerja sama dalam perumusan modul-modul dalam mempersiapkan pedoman penyusunan MPDP tersebut.

Pedoman penyusunan MPDP menjadi hal yang sangat penting mengingat *stakeholder* terkait seperti Kementerian PPN/Bappenas membutuhkan MPDP yang dihasilkan BPIW untuk menyusun program pembangunan 2019-2024.

BPIW juga harus terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, mengingat program dukungan infrastruktur PUPR yang dibuat BPIW akan direalisasikan di daerah. Kesamaan sudut pandang ini penting untuk mempermudah realisasi program-program tersebut.

Koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan juga harus terus dilakukan, karena empat unit organisasi tersebut yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga tak kalah penting untuk tetap dilakukan sehingga program-program pembangunan infrastruktur sektor PUPR dapat disinkronkan dengan mereka.

SDM di BPIW harus terus dilakukan pembinaan, sehingga profesionalisme kerjanya dapat terus meningkat. Peningkatan kualitas SDM ini dapat melibatkan pihak lain, sehingga diharapkan dengan meningkatnya kualitas SDM BPIW dapat berdampak pada peningkatan produk-produk yang dihasilkan.

Dengan semakin banyak tugas yang harus diemban BPIW, maka pembinaan SDM mutlak dilakukan, sehingga dapat selalu sigap dengan berbagai tantangan yang ada.





Diperlukan Koordinasi Dengan Semua Pihak

Ismanto

Mantan Sekretaris Ditjen Cipta Karya/ Pakar Pengembangan Wilayah, Widyaiswara Utama Kementerian PUPR

(Dikutip dari pertemuan jajaran pimpinan BPIW dengan para pakar pengembangan wilayah pada 10 Desember 2018)

Saya ingin memberikan beberapa masukan dari konteks organisasi BPIW. Usia BPIW pada 2018 ini sudah empat tahun, dan 2019 nanti akan bertambah usianya menjadi lima tahun. Dengan akan bertambahnya usia BPIW, maka perlu adanya evaluasi dan kesamaan terkait dasar aturan organisasi dan tugas yang dilaksanakan sehari-hari.

Kita harus melihat dari sisi secara regulasi, tugas BPIW seperti apa dan faktanya seperti apa. Bila ada perbedaan antara regulasi dan pelaksanaannya, maka harus dilakukan evaluasi kembali. Hal ini perlu menjadi perhatian, agar apa yang dijalankan BPIW tidak keluar dari peraturan yang berlaku. Selain itu diharapkan kedepan tugas yang dijalankan BPIW dapat berjalan lancar.

Bila tugas-tugas sudah dijalankan dengan baik maka perlu dilakukan pembinaan ke seluruh insan BPIW. Tujuannya agar apa yang disampaikan BPIW terutama para pejabat eselon menjadi satu suara.

Kemudian, dokumen MPDP perlu dikomunikasikan dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian

PUPR dan Kementerian/ Lembaga. Dengan demikian diharapkan MPDP yang dihasilkan BPIW mendapat pengakuan dari mereka, sehingga untuk dapat diterapkan.

BPIW juga harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mengingat program pembangunan infrastruktur PUPR dilaksanakan di daerah. Contohnya dukungan pembangunan infrastruktur PUPR untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat.

Terkait evaluasi keterpaduan, perlu dilakukan perbandingan sudut pandang sektoral dan sudut pandang keterpaduan. Dengan demikian evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan menyempurnakan program-program apa yang sudah dijalankan sebelumnya. **(Hendra/Ajeng)**





Lina Marlia

Widyaiswara Utama Bidang Penataan Ruang
Kementerian PUPR

Sebagai Koordinator, BPIW Harus Kuat

(Dikutip dari pertemuan jajaran pimpinan BPIW dengan para pakar pengembangan wilayah pada 10 Desember 2018)

Seuai dengan tugas dan fungsinya, maka BPIW perlu terus melakukan kerja sama dengan berbagai sektor. Hal ini sangat penting dilakukan karena BPIW membuat perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur dengan keterpaduan empat ditjen yang melakukan pembangunan fisik, yakni Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, dan Sumber Daya Air.

Dengan kondisi tersebut maka BPIW menjadi kordinator yang memadukan keempat unit organisasi tersebut dalam sebuah perencanaan dan program pembangunan infrastruktur sektor PUPR. Dengan demikian sebuah kawasan itu dapat berkembang dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di suatu wilayah.

Keterpaduan dapat diartikan multisektor, dan dalam menciptakan keterpaduan BPIW tidak sendirian, BPIW harus melibatkan unit organisasi lain. Jadi fungsi koordinator yang diemban BPIW menjadi sangat penting. Sebagai koordinator, organisasi BPIW harus kuat dan solid.

BPIW juga perlu menyingkronkan program-program pembangunan infrastruktur dengan sektor-sektor lain seperti perhubungan, pariwisata, dan pertanian.

Hal ini agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat mendukung program-program dari sektor lain. Tidak hanya itu, BPIW juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas. Saya mengasumsikan hal itu sebagai *regional development* ala Indonesia. *Regional development* itu membutuhkan *big effort* dan biaya besar, karena bersifat multisektor.

Selain itu, BPIW juga harus memperkuat SDMnya, sehingga dapat menjalankan fungsi BPIW sebagai koordinator dengan sebaik-baiknya. Untuk itu BPIW dapat memanfaatkan modul-modul yang dimiliki Widyaiswara sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada.

Dengan demikian kita berharap SDM yang ada di BPIW dapat lebih berkualitas dan siap berperan menjadi koordinator bagi unit organisasi lain sehingga keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dapat berjalan optimal. **(Hendra/Ajeng)**

Produk yang Dihasilkan BPIW Harus Memiliki Standar yang Jelas



Harris Hasudungan Batubara

Mantan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW / Widyaiswara Kementerian PUPR

(Dikutip dari pertemuan jajaran pimpinan BPIW dengan para pakar pengembangan wilayah pada 10 Desember 2018)

Orientasi dari pelaksanaan tugas yang dilakukan BPIW bukan *output*, melainkan *outcome* dan *impact* terhadap pengembangan wilayah. Kalau kita lihat apa yang sudah dikerjakan BPIW sudah bagus. Namun yang harus menjadi perhatian adalah BPIW harus membuat standar terkait produk yang dihasilkan. Misalnya dalam membuat MPDP, maka harus ada standar yang jelas dalam penyusunan MPDP, sehingga pendekatannya masing-masing pusat terutama Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, mempunyai pendekatan yang sama.

Kemudian dari sisi pengembangan wilayah atau kawasan itu, adalah *return* nya?. Mungkin agak sulit, namun saran saya perlu dibuat, misalnya didalam *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) dibuat analisis mengenai berapa turis mancanegara yang akan didatangkan ke Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika, bila pembangunan infrastruktur sektor PUPR dibangun.

Jadi ada rincian per tahunnya. Tidak hanya mengenai terkait perhitungan mengenai turis mancanegara saja, tapi juga terkait hal lain seperti soal ekonomi

masyarakat dan sosial. Kinerja BPIW yang dilakukan sehari-hari harus ditunjang dengan SDM yang handal. Untuk itu kompetensi SDM yang ada perlu dipertajam, sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada. **(Hendra/Ajeng)**



Harus Terus Konsisten Dalam Menghasilkan Produk Berkualitas



Hermanto Dardak

Kepala BPIW Periode 2015-2016 / Pakar Pengembangan Wilayah / Widyaiswara Kementerian PUPR

(Dikutip dari pertemuan jajaran pimpinan BPIW dengan para pakar pengembangan wilayah pada 10 Desember 2018)

Saya melihat BPIW saat ini sudah jauh berkembang, dimana banyak produk yang dilakukan, seperti penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Lombok, dan Borobudur. Selain itu juga BPIW juga turut menangani Palu dan sekitarnya pasca gempa. Langkah yang dilakukan BPIW terkait penanganan Palu ini dapat menjadi contoh baik kedepannya.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan BPIW tersebut harus terus dilakukan secara konsisten sehingga produk yang dihasilkan menjadi produk yang berkualitas. Dulu kita menangani dukungan infrastruktur PUPR untuk 10 prioritas wisata nasional. Kita lakukan keterpaduan dan sinkronisasi untuk kawasan wisata tersebut, agar dapat memberikan *outcome* dan *impact* bagi masyarakat.

Disisi lain, kami melihat suatu organisasi tantangannya adalah melakukan koordinasi dengan lintas sektor dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Itu salah satu tantangan yang harus dihadapi BPIW dengan baik.

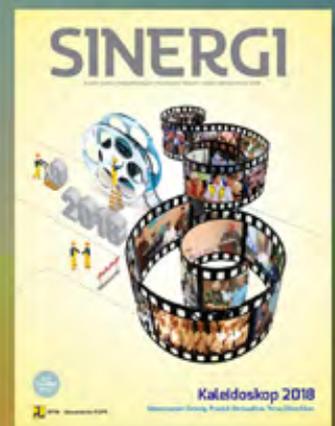
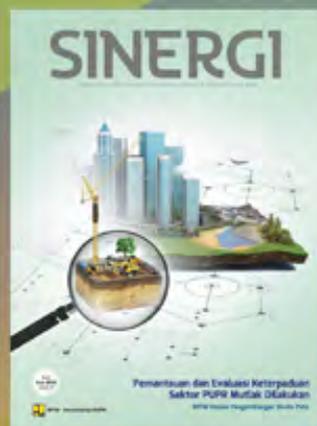
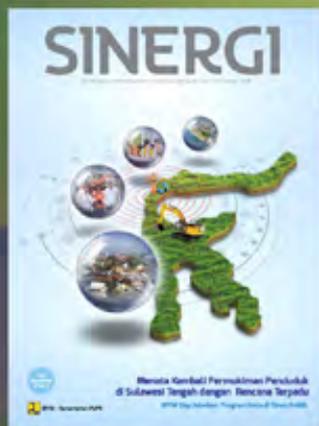
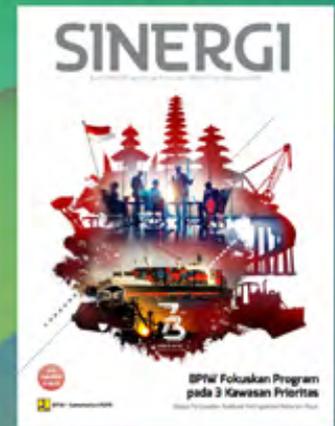
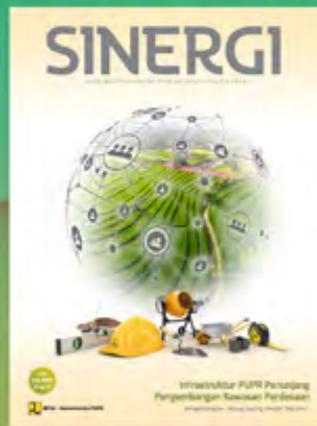
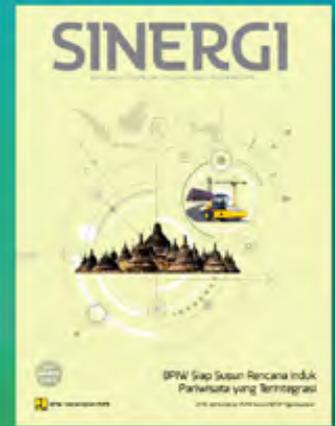
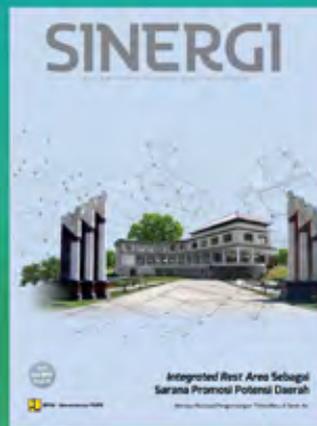
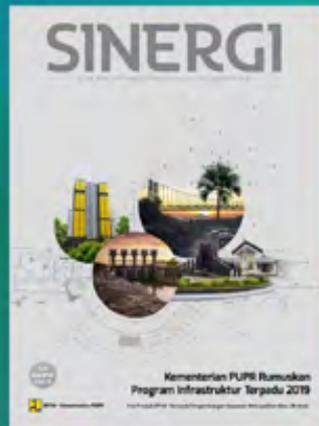
Dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan, maka menjadi tantangan juga bagi BPIW dalam mengembangkan kawasan perkotaan dengan berbasis pengembangan wilayah. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat tema-tema yang menjadi potensi yang dapat dikembangkan di suatu kota. Tantangan lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sumber daya manusia BPIW harus dibangun dengan kompetensi yang tinggi dan memiliki rasa memiliki terhadap BPIW yang tinggi, sehingga produk-produk yang dihasilkan lebih berkualitas. Kemudian, kita harus menyadari bahwa BPIW ini sangat terkait dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Kementerian PUPR. Sehingga *capacity building* yang diberikan kepada para pemangku kepentingan itu menjadi hal yang penting. Tentunya penekanan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) bisa difokuskan untuk meningkatkan *capacity building* tersebut.

Paling utama tentunya saya berharap *outcome* dan *impact* dari perencanaan dan pemrograman yang dibuat BPIW dapat cepat terwujud. Sehingga Indonesia memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain terutama negara-negara di Asia Tenggara.

Selain itu saya berharap perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR yang dibuat BPIW dapat menjawab isu-isu pengembangan wilayah, seperti isu mengenai disparitas antar wilayah, lingkungan, dan perekonomian masyarakat. Sehingga dapat diketahui penanganan seperti apa yang akan dilakukan Kementerian PUPR terhadap isu-isu tersebut. **(Hendra/Ajeng)**

Kaleidoskop 2018



Sepanjang 2018, BPIW Kementerian PUPR telah melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana kegiatan yang telah dilakukan dimuat di buletin Sinergi yang setiap bulannya terbit (dengan tampilan cover yang tergambar di atas). Selain di buletin, kegiatan BPIW juga dimuat di website. Dari sejumlah berita, kali ini tim redaksi Buletin Sinergi merangkum kegiatan-kegiatan penting BPIW di sepanjang tahun 2018. Berikut ulasannya pada Kaleidoskop 2018 :



Kementerian PUPR Tingkatkan Daya Saing dengan Percepatan Pengembangan Infrastruktur

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini senantiasa memacu percepatan pengembangan infrastruktur wilayah, harapannya hasil pembangunan infrastruktur dapat mewujudkan peningkatan daya saing.

“Sejalan dengan amanat RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,-red) III tahun 2015-2019, yakni Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA (Sumber Daya Alam,-red) yang tersedia, SDM (Sumber Daya Manusia,-red) yang berkualitas serta kemampuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,-red),” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat paparan “Pengembangan Wilayah Indonesia Berbasis Sumber Daya” dalam acara “Diskusi Bareng Pakar” di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tangerang Selatan, Banten. **(ris/infoBPIW)**

Menteri PUPR Ikut Dampingi Wapres Kunker Tinjau Penanganan *Stunting* di NTB

Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono mendampingi Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla bersama Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) dan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/7). Dari Kementerian PUPR turut hadir juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW, Lana Winayanti serta jajarannya.

Rombongan Wapres Jusuf Kalla yang disambut Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi ini meninjau penanganan *stunting* (kekerdilan) di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB.

Dalam kunjungan tersebut Wapres mengatakan, “Program ini terkait masa depan generasi muda di Indonesia. *Stunting* dalam bahasa Indonesia kerdil, kita bicara kekerdilan karena kalau bayi sampai anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil tapi otaknya juga kerdil jadi tidak maksimal nantinya,” ujarnya. **(ris/dra/infoBPIW)**





Kementerian PUPR Lakukan 7 Strategi Agar Program Infrastruktur Tepat Sasaran dan Tepat Waktu

Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi. Agar percepatan infrastruktur dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu, menurut Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Lana Winayanti ada tujuh strategis yang diterapkan Kementerian PUPR.

Dari tujuh strategis tersebut, beberapa diantaranya adalah keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah. Strategi lainnya adalah meningkatkan dukungan pemerintah daerah terutama dalam hal penyediaan *readiness criteria* (kriteria kesiapan) yang menjadi tanggung jawab daerah. **(Hen/infobpiw)**

Pengembangan Infrastruktur PUPR bakal Diselaraskan dengan Visi Indonesia 2045

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan dukungan untuk dapat mewujudkan Visi Indonesia 2045.

"Saat ini salah satu tantangan berat untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 yakni koordinasi antar lembaga negara," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat membuka rapat koordinasi "Visi Indonesia 2045" di ruang Rapat BPIW, Jakarta, Kamis (11/1).

Visi Indonesia 2045, lanjutnya, peta jalan untuk menuju bangsa yang mandiri dan kuat. Saat ini pemerintah sudah memulai menguatkan fondasi dengan memperbanyak pembangunan infrastruktur yang mantap. **(ris/infoBPIW)**



Kepala BPIW: Pengembangan Data Geospasial Sangat Penting Dilakukan

Data geospasial akan selalu menjadi *input* atau masukan utama dalam pengembangan/pemanfaatan ruang termasuk pengembangan infrastruktur PUPR didalamnya. Untuk itu, menurut Kepala BPIW Hadi Sucahyono, kedepan, sangat penting melakukan pengembangan data-data geospasial yang berkualitas dalam mendorong perencanaan infrastruktur PUPR yang tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat optimal.

"Informasi geospasial ini melengkapi dari data-data yang kami lakukan terutama dalam penanganan bencana alam di Sulawesi Tengah. Data geospasial menjadi acuan disamping data-data statistik," ujar Hadi saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara Forum Ilimiah tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (ISI), di Padang, Rabu (7/11). Acara ini sendiri berlangsung 6 hingga 8 November. **(Hen/infobpiw)**





Pembangunan Infrastruktur PUPR Mengacu pada Pembangunan Berbasis Lingkungan

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR dalam prakteknya mengacu pada pembangunan yang berbasis lingkungan. Hal ini untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur PUPR yang berkelanjutan. Kepala BPIW Hadi Suahyono menjelaskan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan.

“Pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan preservasi sumber daya,” demikian disampaikan Hadi saat menjadi salah satu *keynote speaker* pada seminar nasional dengan tema “Infrastruktur Berkelanjutan” yang diadakan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Kamis (29/11). Dikatakannya pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga memperhatikan agenda internasional seperti *New Urban Agenda* (NUA). **(Hen/infobpiw)**

Kepala BPIW: Pembangunan Infrastruktur Dipastikan Libatkan Masyarakat Sejak Perencanaan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan selalu melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur. Pelibatan tersebut bahkan dimulai sejak perencanaan hingga implementasi konstruksinya.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono mengatakan, keterlibatan multipihak dalam pembangunan infrastruktur memang mutlak diperlukan, agar pembangunan dapat berjalan lancar.

“Kementerian PUPR melibatkan masyarakat luas sejak perencanaan. Bahkan, sampai implementasi konstruksinya,” ungkap Hadi dalam acara “*Dialog Lunch Talk Berita Satu TV*” di Jakarta, Kamis siang, (6/12). **(ris/ind/infoBPIW)**



Kembangkan Kebijakan Satu Peta, Kementerian PUPR Menerima Medali Emas Simpul Jaringan Geospasial

Kementerian PUPR menerima penghargaan Bhumandala Kanaka Tahun 2018 atau Medali Emas untuk Kategori Simpul Jaringan Geospasial Terbaik Tingkat Kementerian/Lembaga dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Penghargaan tersebut diterima Kepala BPIW Hadi Suahyono mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara Bhumandala Award 2018 yang diselenggarakan bersamaan dengan Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Peluncuran Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di Jakarta, Selasa, (11/12/18). **(ris/infobpiw)**



BPIW Turut Mendukung Implementasi Infrastruktur Hijau

BPIW Kementerian PUPR turut mendukung implementasi infrastruktur hijau untuk merespon deforestasi hutan dan lahan. Pasalnya, hal tersebut bagian dari upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air. Salah satunya dengan mendukung kegiatan Kementerian PUPR memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia yang tahun ini dipusatkan di Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (17/12).

Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dengan tema "Menanam Pohon Bagi Penyelamatan Lahan dan Air" serta rangkaian acara Hari Bakti PU ke-73 dan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-19. **(ris/Birkom/infoBPIW)**



Triplehelix, Strategi Kementerian PUPR untuk Memenangkan Persaingan di Era Pasar Global

Guna memenangkan persaingan dalam era pasar global, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan terobosan meningkatkan daya saing bidang konstruksi melalui konsep *triplehelix*. Yakni melakukan kerjasama untuk saling bersinergi antara Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha dan Pemerintah.

"Dalam hal ini perguruan tinggi berperan sebagai laboratorium riset, inkubator produk inovatif, jaringan pengetahuan dan teknologi, serta basis produksi SDM (Sumber Daya Manusia, -red) ahli," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Suahyono mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono saat menyampaikan orasi ilmiah bertajuk "Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur untuk Mencapai Peningkatan Daya Saing Ekonomi Indonesia" pada Wisuda dan Dies Natalis Universitas Pancasila ke-52 di *Jakarta Convention Center (JCC)*, Rabu (14/11). **(ris/infoBPIW)**



Tol Trans-Jawa Memberikan Dampak Positif Bagi Ekonomi Masyarakat

Pada 20 Desember, Presiden Joko Widodo meresmikan empat ruas jalan tol Trans- Jawa seksi Jawa Timur, yakni jalan tol Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono, Jombang-Mojokerto seksi Bandar-Kertosono, Gempol-Pasuruan seksi Pasuruan-Grati, dan Surabaya-Gempol seksi Relokasi Gempol-Porong sepanjang.

Sehubungan dengan hal itu Kepala BPIW Hadi Suahyono mengatakan Tol Trans- Jawa memberikan pengaruh positif pada sektor ekonomi masyarakat. Menurutnya jalan tol yang dibuat Kementerian PUPR didasari pada kebutuhan akan kelancaran logistik dan permintaan volume kendaraan yang terus meningkat. "Transportation cost-nya kita tekan sehingga harga barang akan lebih murah," ungkap Hadi beberapa waktu lalu. **(Hen/infobpiw).**



Wujudkan Infrastruktur Tanggap Perubahan Iklim dan Risiko Bencana, BPIW Susun Rapermen RAN MAPI PRB

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) PUPR tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengurangan Risiko Bencana (RAN MAPI PRB) Kementerian PUPR.

Hal itu terungkap dalam Rapat Tim Pelaksana MAPI dan PRB Kementerian PUPR yang dibuka langsung Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW yang juga Ketua Tim Pelaksana MAPI dan PRB Kementerian PUPR, Bobby Prabowo di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (24/1). [\(ris/infoBPIW\)](#)



Pengembangan Infrastruktur PUPR Diarahkan Untuk Penuhi 3 Unsur Sasaran

Arah kebijakan nasional infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke depan dititikberatkan pada tiga hal, yakni pengembangan infrastruktur untuk penunjang pemberantasan kemiskinan, penunjang kebangkitan ekonomi masyarakat serta penunjang dalam mengurangi kesenjangan antar kawasan.

Demikian diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat membuka Pembahasan Arah Kebijakan Nasional Bidang Infrastruktur PUPR di Bandung, (25-26/1). [\(ris/infoBPIW\)](#)

Optimalkan Capaian 2019, BPIW Lakukan *New Initiative Program* dan Kegiatan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPIW Kementerian PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2019 bertekad mengambil peran lebih dari tugas pokok dan fungsi yang telah ada. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan anggaran BPIW di tahun 2019.

Oleh karena itu menurut Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H Napitupulu, BPIW perlu memiliki *New Initiative* (inisiatif baru, red) Program dan Kegiatan tahun 2019. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada rapat "Pembahasan Usulan *New Initiative Program*, Kegiatan dan Anggaran BPIW Tahun 2019" di Bandung, Senin sore, (26/3). [\(ris/infoBPIW\)](#)





Optimalisasi Capaian Kinerja, BPIW Matangkan *New Initiative* 2019

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan usulan *New Initiative* tahun 2019. Hal tersebut dilakukan untuk optimalisasi capaian kinerja BPIW pada tahun-tahun mendatang.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, inisiatif baru BPIW tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan program Kementerian PUPR. "*New Initiative* BPIW ini akan segera disampaikan kepada Bapak Menteri PUPR. Sebab, bersifat penting dalam mempersiapkan program kerja baru di tahun mendatang," ungkap Lana saat menyampaikan Arahan Kebijakan BPIW dalam "Pembahasan Usulan *New Initiative Program*, Kegiatan dan Anggaran BPIW Tahun 2019" di Jakarta, (27/3) lalu. **(ris/infoBPIW)**

Kualitas MPDP WPS Terus Ditingkatkan

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis melakukan penyusunan Pedoman Tata Cara Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Hadi Sucahyono mengatakan, BPIW selama tahun 2015-2016 telah menyusun MPDP 35 WPS. "Dokumen MPDP yang telah tersusun tersebut, memiliki prosedur penyusunan yang beragam sesuai perkembangan waktu dan dinamika substansi di masing-masing WPS," papar Hadi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Pembahasan Tata Cara Penyusunan MPDP WPS di Jakarta, akhir pekan kemarin. Harapannya akan didapat kualitas yang baik seluruhnya untuk masing-masing MPDP WPS," papar Hadi. **(ris/infoBPIW)**



Perencanaan Infrastruktur PUPR akan Dibuat Lebih Komprehensif

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan membuat perencanaan infrastruktur sektor PUPR lebih komprehensif, dengan memasukkan aspek analisa daya dukung seperti daya dukung tanah atau aspek geologi.

"Kita menyadari bahwa ketika kita mengandalkan perencanaan yang ada misalkan dari RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah, maka kajian mengenai kandungan tanah atau kandungan geologinya masih kurang. Jadi ini catatan buat kita terkait perencanaan infrastruktur di bidang mitigasi," ujar Kepala BPIW Hadi Sucahyono saat memberikan pandangannya pada *Sharing Knowledge Management*, di Jakarta, Jumat (19/10). **(Hen/infoBPIW)**



Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Strategis Dipertajam

Guna melakukan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan, BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis melakukan penajaman penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan strategis tahun anggaran (TA) 2018.

“Keterpaduan perencanaan dan pemrograman dalam pengembangan kawasan memang dinilai perlu terus ditingkatkan. Terlebih, saat ini Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang tak mudah dalam pengembangan infrastruktur,” ungkap Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Wahyu Hendrastomo mewakili Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, saat membuka “Rapat Pembahasan Penyusunan *Quick Assessment* Pengembangan Infrastruktur PUPR Terpadu di Kawasan Strategis” di Jakarta, Senin (11/6). **(ris/infoBPIW)**



BPIW Libatkan Para Ahli Pengembangan Wilayah Untuk Menghasilkan Produk yang Lebih Berkualitas



Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono beserta jajarannya melakukan silaturahmi dengan para ahli pengembangan wilayah, Senin (10/12).

Dari beberapa ahli pengembangan wilayah yang diundang, dua diantaranya merupakan mantan Kepala BPIW, yakni Hermanto Dardak dan Rido Matari Ichwan. Tidak hanya bersilaturahmi, Hadi juga mengajak para ahli berkontribusi

dengan menyumbangkan keahliannya lewat produk yang dihasilkan BPIW seperti *policy brief* atau masukan yang diberikan kepada Menteri PUPR terkait kebijakan-kebijakan yang ada. *Policy brief* tersebut terkait isu-isu strategis seperti pengaruh pengembangan jalan tol terhadap Pantura (Pantai Utara), rencana pengembangan Jabar Selatan, arah pengembangan Batam Bintan, Kota Baru Maja, dan pembangunan Papua. **(Hen/aje/infobpiw)**

Dukungan Terhadap KSPN Prioritas/KEK



Pengembangan KSPN BTS Tetap Menjaga Kelestarian Alam

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, konsep pengembangan kawasan dalam masterplan dan developmenplan (MPDP) KSPN BTS sangat memerhatikan berbagai aspek.

"Pembangunan infrastruktur tak hanya untuk mendorong sentra ekonomi, namun juga untuk kelestarian lingkungan dengan memerhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan yang dikembangkan," terang Hadi. **(ris/mond/infoBPIW)**

Target Kunjungan 500 Ribu Wisman, PUPR Dukung Pengembangan KSPN Tanjung Kelayang

BPIW mendukung akselerasi pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang di Provinsi Bangka Belitung.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, dukungan infrastruktur PUPR dilakukan salah satunya untuk mengatrol jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. "Pada tahun 2019, KSPN Tanjung Kelayang ditargetkan meraih kunjungan 500 ribu wisatawan mancanegara dan 1 juta wisatawan domestik," ujar Hadi di Kantor BPIW, Jakarta, (2/7). **(ris/mond/infoBPIW)**



Program Penataan Kawasan Nelayan Mandalika Akan Disiapkan

BPIW menyiapkan program penataan kawasan nelayan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kawasan Mandalika ini juga masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Nantinya program penataan kawasan nelayan ini melibatkan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, terutama Perumahan dan Cipta Karya. Menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono keterpaduan sangat diperlukan untuk menata kawasan tersebut.

"Penataan kawasan Mandalika dan sekitarnya akan melibatkan unor-unor di Kementerian PUPR seperti Ditjen Penyediaan Perumahan, di mana melalui program rumah swadaya dapat dilakukan bedah rumah," ujar Hadi, Kamis (13/9). **(Hen/aje/infoBPIW)**





Program Jangka Menengah Disiapkan Untuk Mendukung KSPN Morotai

Kawasan Morotai yang berada di Provinsi Maluku Utara, merupakan salah satu dari 12 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. Tidak hanya itu, daerah tersebut juga merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah ditetapkan pemerintah dan merupakan kawasan perbatasan.

Menurut Hadi Sucahyono untuk mendukung KSPN Morotai sejumlah program utama di tahun 2018 tengah dilakukan seperti Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional Daruba dan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Utama - Morotai I hingga V di Kab. Pulau Morotai. Selain juga ada Penggantian Jembatan Ruas Bts. Kota Daruba-Sanggowo, Pembangunan Bendung Tiley, dan Pembangunan Rumah Khusus Kawasan Perbatasan.

"Kita juga telah memilik sejumlah program jangka menengah untuk mendukung KSPN Morotai," ujar Hadi di Workshop Lintas Sektoral terkait *Tourism Integrated Masterplan* (ITMP) Morotai di Jakarta. **(Hen/infobpiw)**

Kementerian PUPR Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman KSPN Prioritas

Kementerian PUPR berkomitmen mendukung percepatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Tanah Air. Salah satunya melalui kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kawasan destinasi wisata. Kepala BPIW, Hadi Sucahyono saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memaparkan, kegiatan tersebut mulai dari pemenuhan rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan baru.

"Ada juga penataan lingkungan perumahan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)," ungkap Hadi saat paparan "Dukungan Pengembangan Perumahan di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas" pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata 2018 yang mengambil tema "Investasi dan Pembiayaan Sektor Pariwisata" di Jakarta, Rabu, (26/9). **(ris/infoBPIW)**



Dukung Pengembangan Pariwisata, Kementerian PUPR Ikuti *Launching Homestay dan Tourist Guide*

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mewakili Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono turut mengikuti acara "*Launching Pilot Project Pengembangan Kewirausahaan Sektor Pariwisata*" berupa *Homestay* dan *Tourist Guide* di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (20/9).

Pelaksanaan *launching* tersebut ditandai dengan pemukulan gonggong oleh para pimpinan kementerian/lembaga terkait pengembangan pariwisata, yakni Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Rosdiana V Sipayung, Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Asrorun Niam Soleh. **(ris/hen/InfoBPIW)**





BPIW Pastikan Penanganan Terpadu Infrastruktur Empat Sektor di 10+2 KSPN

Kementerian PUPR melalui BPIW memastikan penanganan terpadu infrastruktur empat sektor berjalan di 10+2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas.

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, Kementerian PUPR saat ini gencar melakukan penanganan infrastruktur terpadu empat sektor untuk 10+2 KSPN prioritas dalam rangka mewujudkan “Bali Baru”, mulai dari sektor pengembangan konektivitas, sektor pengembangan infrastruktur permukiman, sektor pengelolaan sumber daya air serta penyediaan perumahan. “Hal tersebut dilakukan untuk menunjang tercapainya target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019,” ungkap Hadi selaku narasumber Diskusi Panel “Dukungan Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas” dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-3 Kepariwisata Indonesia di Jakarta (26/9). **(ris/infoBPIW)**

2019 Ditarget Kunjungan 1 Juta Turis, Kementerian PUPR Dukung Pengembangan KSPN Tanjung Lesung

BPIW telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung percepatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung di Banten.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyatakan, KSPN Tanjung Lesung merupakan salah satu KSPN prioritas untuk dikembangkan pemerintah. Pengembangan KSPN Tanjung Lesung sendiri akan berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke KSPN tersebut.

“Terlebih KSPN Tanjung Lesung pada tahun 2019 ditargetkan mendapat kunjungan 1 juta wisatawan mancanegara dan 5 juta wisatawan nusantara,” ungkap Hadi. **(ris/mond/infoBPIW)**



Pengembangan Labuan Bajo Menjadi “Bali Baru” Terus Digenjot

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, kawasan wisata yang berada di wilayah Indonesia Timur tersebut merupakan bagian KSPN prioritas untuk dikembangkan menjadi “Bali Baru”. Pengembangan terhadap Labuan Bajo tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke KSPN tersebut.

“KSPN Labuan Bajo pada tahun 2019 telah ditargetkan mendapat kunjungan 500 ribu wisatawan mancanegara, kendati pada tahun 2016 Labuan Bajo baru dikunjungi 26 ribu wisatawan mancanegara,” ungkap Hadi saat ditemui di Kantor BPIW Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu. **(ris/mond/InfoBPIW)**



4 Komponen Alokasi Pembiayaan Pengembangan di 3 KSPN Prioritas

BPIW tengah menyusun *Integrated Tourism Masterplan Program* (ITMP) di tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah) dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat).

"Total dana yang akan diberikan Bank Dunia dalam pengembangan pariwisata itu sebesar 300 juta dolar Amerika," ungkap Hadi saat paparan "Rencana Penggunaan Dana Pinjaman Bank Dunia Terkait Pembangunan Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata Prioritas" dalam acara "Kick off Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan" di Kantor Bappenas, Jakarta. **(ris/infoBPIW)**



Kementerian PUPR akan Bangun Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir

Sebagai salah satu dari tiga Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan mendapat bantuan dari Bank Dunia, kawasan Danau Toba merupakan kawasan yang diprioritaskan mendapat dukungan infrastruktur oleh Kementerian PUPR yang saat ini tengah direalisasikan, salah satunya di kabupaten Samosir yaitu pembangunan jembatan Tano Ponggol.

Hal tersebut terungkap saat Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara Rappidin Simbolon beserta jajarannya melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (6/12) lalu. **(Hen/infobpiw)**

Penyusunan ITMP/ITDP

Pelaksanaan Penyusunan *Integrated Tourism Masterplan Program* di 3 Kawasan Wisata Dimulai

BPIW ditugaskan menyusun *integrated tourism masterplan program* (ITMP) di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika atau Lombok (Nusa Tenggara Barat).

Hal ini merupakan upaya pemerintah mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang pada tahun 2019 mendatang. Pendanaan ketiga KSPN tersebut mendapat bantuan dari Bank Dunia atau World Bank.

Menurut Kepala BPIW, Hadi Sucahyono untuk pembangunan fisik, total dana yang akan diberikan Bank Dunia untuk 3 KSPN itu sebesar 300 juta dolar Amerika dan non fisik atau untuk 3 ITMP kawasan pariwisata itu, sebesar 4 juta dolar Amerika. **(Hen/infobpiw)**



Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia Sepakati Substansi *Loan Agreement* Terkait Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata

World Bank atau Bank Dunia dan pemerintah Indonesia menyepakati substansi *Loan Agreement* atau Perjanjian Pinjaman Terkait Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di Danau Toba, Borobudur, dan Lombok. Hal ini disepakati pada saat dilakukan diskusi teknis terkait pinjaman untuk proyek pengembangan pariwisata di Indonesia atau Indonesia *Tourism Development Project* (ITDP) di kantor Bank Dunia, (19/4) lalu.

Pada kesempatan itu Bank Dunia menyetujui untuk memberikan bantuan dukungan dana sebesar 300 juta dolar Amerika untuk kegiatan fisik dan non fisik di Kawasan Strategis Pariwisata tersebut. Kemudian juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Teknis antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. **(Heru/Catri/Ela/infoBPIW)**

Pemerintah Mulai Susun ITMP KSPN Borobudur

BPIW Kementerian PUPR secara resmi memulai penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, pengembangan sektor pariwisata cenderung lebih cepat mendatangkan manfaat dibanding sektor lainnya. Sehingga, wajar sektor pariwisata mendapat perhatian pemerintah dalam rangka membangun perekonomian negara.

"Dalam penyusunan ITMP untuk Kawasan Borobudur diharapkan melahirkan dokumen rencana induk terintegrasi yang mewujudkan sektor pariwisata di kawasan Borobudur dan sekitarnya benar-benar berkembang dengan baik," ungkap Lana saat membuka dan memberikan arahan pada "Kick off Meeting Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) di Kawasan Borobudur" di Jakarta, Kamis (7/6). **(ris/hen/infoBPIW)**



Penyusunan ITMP Danau Toba Dorong Pengembangan Kawasan Pariwisata

BPIW Kementerian PUPR menggelar *Kick Off Meeting* penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba atau *for Lake Toba* di Medan (23/07) lalu.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Ir. Kuswardono, MCP dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kuswardono, maka penyusunan ITMP mulai dilakukan. Ditargetkan penyusunan rencana induk pariwisata terpadu itu dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. **(Tiara/Hen/infobpiw)**



Pengembangan KSPN Lombok Dilakukan Terpadu dan Komprehensif

Guna dimulainya penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar "*Kick Off Meeting* dalam Rangka Pembahasan Pelaksanaan Penyusunan ITMP" di Mataram, akhir Juli 2018 lalu.

"ITMP Lombok merupakan sebuah upaya perencanaan untuk mengembangkan dan pembangunan KSPN melalui pendekatan terpadu dan komprehensif untuk seluruh aspek dan sektor. Tentunya dengan melibatkan seluruh stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi antar pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan ini diwadahi dalam bentuk kelembagaan penanganan berupa Kelompok Kerja (Pokja)", ungkap Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kuswardono saat membuka tersebut. **(AyuWidya)**

BPIW Lakukan Identifikasi Potensi Pengembangan Wisata Lombok

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan rangkaian teknis tahapan penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Lombok.

Untuk tahap awal melakukan identifikasi potensi pengembangan pariwisata di Lombok melalui kunjungan lapangan ke kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (1/8)

Kunjungan lapangan dimulai pada salah satu lokasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilaksanakan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis, Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. **(Ayuwidya)**



Susun ITMP, BPIW Himpun Masukan Pemerintah Daerah

Guna memberikan gambaran umum mengenai apa yang telah dilakukan pada bulan pertama dari penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, digelar pembahasan Laporan Pendahuluan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, di Magelang Senin (3/9).

Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Kuswardono, kegiatan tersebut juga untuk mengomunikasikan rencana kerja tim konsultan terutama kepada Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyusunan ITMP tersebut, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Komunikasi rencana kerja tim tersebut juga dilakukan dengan kementerian atau lembaga lain yang juga turut hadir pada acara tersebut seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pariwisata. **(Hen/Ico/Dextrin/infoBPIW)**



Pemerintah Jaring Masukan Pemangku Kepentingan Untuk Penyusunan ITMP Danau Toba

Dalam rangka menjaring masukan penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Danau Toba, Kementerian PUPR melalui BPIW bersama Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), serta delapan pemerintah kabupaten di sekitar Danau Toba menggelar "Focus Group Discussion (FGD) ITMP untuk Danau Toba" di Toba Samosir, Sumut, Kamis (6/9).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Hj. R. Sabrina yang dibacakan Kepala Sub Bidang (Kasubid) Kawasan Strategis dan Kerjasama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumut, M Yosi. **(Ico/Ris/Pongki/Kandar/infoBPIW)**

BPIW Pastikan Kawal Proses ITDP Berjalan Sesuai Rencana

BPIW Kementerian PUPR siap melakukan pemenuhan segala ketentuan untuk pencairan pinjaman Bank Dunia untuk Indonesia *Tourism Development Project* (ITDP).

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, BPIW siap mengawal agar proses *Loan Signing* dan *Loan Effectiveness* untuk Indonesia *Tourism Development Project* dapat berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan.

"*Loan Signing* dijadwal pada 22 Oktober 2018. Adapun *Loan Effectiveness* dijadwalkan pada 1 November 2018," ungkap Hadi saat membuka Rapat "*Indonesia Tourism Development Project, First Implementation Support Mission: Wrap-up Meeting 15 October 2018*," di kantor BPIW, Senin (15/10). **(ris/infoBPIW)**



Tahun 2018, Kementerian PUPR Targetkan Susun 6 Masterplan KPPN

BPIW berkomitmen melakukan percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). BPIW sendiri menargetkan penyusunan enam *masterplan* KPPN dari 19 *masterplan* KPPN yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2018 dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Keenam *masterplan* KPPN itu, yakni *masterplan* KPPN Boalemo, KPPN Bengkayang, KPPN Lombok Tengah, KPPN Muna Barat, KPPN Konawe Selatan dan KPPN Ngada," ungkap Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga mewakili Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat menyampaikan arahan dalam kegiatan "Persiapan Penyusunan *Masterplan* KPPN Tahun Anggaran (T.A) 2018" di Jakarta. **(ris/infoBPIW)**



BPIW Jaring Masukan untuk Menyusun *Masterplan* KPPN dan Kota Kecil Kawasan Perbatasan

Guna menjaring masukan untuk menyempurnakan penyusunan dokumen *masterplan* dan pra-desain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan Kota Kecil Kawasan Perbatasan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar "Rapat Pembahasan *Masterplan* KPPN dan Kota Kecil Kawasan Perbatasan Negara Tahun Penyusunan 2018," di Jakarta, Selasa (14/8).

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga saat menyampaikan arahan mengatakan, Nawacita Presiden pada poin ke-3 mengamanatkan pembangunan nasional diutamakan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. **(sin/infoBPIW)**

Dorong Pengembangan KPPN, Kepala BPIW Lakukan Audensi dengan Bappeda Lombok Tengah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyusun *masterplan* pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Masterplan* ini kedepannya diharapkan menjadi acuan pengembangan infrastruktur di kawasan perdesaan, baik sektor PUPR maupun non-PUPR.

Guna mendiskusikan pengembangan kawasan perdesaan tersebut, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (13/9). Kunjungan ini untuk mendapatkan masukan dari Bappeda yang bertugas mensinergikan perencanaan lintas sektor di daerah. **(Hen/Ajeng/Pilas/infobpiw)**



Program Prioritas KPPN dan Kota Kecil Perbatasan Dipertajam

BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melakukan penajaman program-program prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan Kota Kecil Perbatasan untuk tahun anggaran 2020. Penajaman program tersebut dilakukan saat digelarnya Workshop Internal Unit Organisasi (unor) sektor PUPR, pertengahan September lalu.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan penajaman program-program prioritas tersebut terkait *readiness criteria* (kesiapan kriteria), ketepatan nomenklatur, harga satuan, dan volume. Selain melakukan penajaman untuk mendapat bahan masukan terhadap Pra Konsultansi Regional pada 2019 mendatang, menurut Agusta tujuan utama kegiatan *workshop* ini untuk mendapatkan masukan dari unor-unor di lingkungan Kementerian PUPR baik di pusat dan daerah dan mendapatkan pengayaan terhadap *masterplan* atau rencana induk yang disusun oleh BPIW. **(Shindie/Hen/infobpiw)**

Dukung Percepatan Pengembangan KPPN, BPIW Selesaikan Enam *Masterplan*

BPIW Kementerian PUPR mendukung percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Kementerian PUPR pada tahun 2018 telah melakukan penyusunan enam *masterplan* KPPN dari 20 *masterplan* KPPN yang menjadi tanggung jawab kementerian PUPR dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Adapun 14 *masterplan* KPPN lain telah diselesaikan penyusunannya pada tahun 2016 dan 2017.

"*Masterplan* KPPN yang disusun akan menjadi acuan semua pihak dalam melakukan pengembangan KPPN," ungkap Hadi dalam acara "Sarasehan Nasional Pengembangan KPPN" di Jakarta, Selasa (27/11). **(ris/infoBPIW)**





BPIW Susun *Masterplan* Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) pada tahun 2018 melakukan penyusunan *masterplan* pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan negara, yakni Kawasan Skouw di Distrik Muaralami, Kota Jayapura, Papua.

Hal itu dipaparkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penyusunan *Masterplan* Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara yang digelar di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (9/4). ([ris/afri/infoBPIW](#))

BPIW Siapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Cagar Budaya dan Alam

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berkomitmen untuk melakukan berbagai dukungan infrastruktur yang sesuai tema kawasan.

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo mengatakan, perencanaan pengembangan infrastruktur memang perlu disesuaikan dengan tema kawasan, agar hasil dari pembangunan infrastruktur sesuai tujuan dan memiliki dampak positif bagi lingkungan.

"Jangan sampai pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan malah kontraproduktif atau menurunkan mutu lingkungan," ungkap Bobby saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Awal Dukungan Penguatan Keterpaduan Infrastruktur PUPR untuk Pelestarian Cagar Budaya dan Alam Indonesia di Jakarta, Senin (27/8). ([ris/infoBPIW](#))



Kembangkan Kawasan Perbatasan dengan Timur Leste, BPIW Dukung Pengembangan Maluku Barat Daya dan Alor

Dalam pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan Timur Leste, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2018 melakukan program pengembangan infrastruktur di Kabupaten Maluku Barat Daya, antara lain, bidang Sumber Daya Air terdapat pembangunan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kawasan pulau terluar kawasan Nauru Kec. Kisar serta pembangunan embung serbaguna Batumeaw II Pulau Leti. **(ris/infoBPIW)**



TNI AD-BPIW Koordinasi Terkait Akselerasi Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia

Kepala Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Iwan Nurwanto dan jajaran pejabat BPIW menerima perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) Staf Ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yakni Kononel Inf. Widhayat, Kolonel Czi. M Reza Utama, Kolonel Kav. Hendrikus Joko Rianto di Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Kamis (29/11). Kunjungan

perwakilan Pokja Staf Ahli tersebut dalam rangka koordinasi penyusunan kajian terkait "Akselerasi Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia melalui Sinergitas Program TNI AD, Kementerian Terkait dan Pemerintah Daerah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Selanjutnya BPIW dan TNI AD akan melakukan kegiatan kalobarasi terkait Akselerasi Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. **(ris/infoBPIW)**

VISI KOTA MASA DEPAN: KOTA BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING 2015 - 2045

Pilar Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing



BPIW-Ditjen Tata Ruang Lakukan Sinkronisasi Program Terkait NUDP

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melakukan sinkronisasi program terkait *National Urban Development Strategy* (NUDS) melalui *National Urban Development Program* (NUDP). Hal itu terungkap dalam Diskusi Pembahasan Persiapan Pelaksanaan NUDS melalui NUDP

di Ruang Rapat Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR, Jakarta, Kamis (18/1). Diskusi yang dibuka langsung Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki ini menghadirkan narasumber Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Napitupulu serta Tenaga Ahli Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, Maurin Sitorus. Diskusi tersebut juga dihadiri perwakilan dari Unit Organisasi di Kementerian ATR. **(ris/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Pacu Percepatan Realisasi 11 Kota Baru

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan realisasi 11 Kota Baru. Ke 11 Kota Baru tersebut, terdiri atas Kota Baru Maja, Kota Baru Pontianak, Kota Baru Sofifi, Kota Baru Tanjung Selor, Kota Baru Palembang, Kota Baru Manado, Kota Baru Makassar, Kota Baru Sorong, Kota Baru Padang, Kota Baru Banjar Baru dan Kota Baru Jayapura.



Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat menjadi narasumber *Real Estate Round Table* yang mengambil tema "*The Economics of New Towns*" di Jakarta, Kamis sore (15/3). **(Ris/InfoBPIW)**



Indonesia-Perancis Tindaklanjuti Kerja Sama Perencanaan Perkotaan

Dalam rangka menindaklanjuti perjanjian kerjasama Republik Indonesia (RI)-Perancis dalam bidang Pembangunan Kota Berkelanjutan, Pemerintah Perancis menghadirkan ahli perencanaan perkotaan dari Perancis untuk dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam perencanaan perkotaan.

Kerjasama tersebut diimplementasikan dalam forum *"Strengthening France-Indonesia Cooperation on Urban Planning: Sharing Knowledge in Benefit Analysis of Integrated Infrastructure on Public Works and Housing in Strategic Development Region"* yang digelar Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, pekan lalu.

Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah pakar dan tenaga ahli dari kedua pihak. Dari pihak Perancis, hadir perwakilan dari Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia dan Tenaga Ahli Perencanaan Perkotaan dari *French Environment and Energy Management Agency (Ademe)*.
(mar/info BPIW)

Kementerian PUPR Percepat Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Kepulauan Nusa Tenggara

BPIW Kementerian PUPR terus memacu percepatan pengembangan Metropolitan Mataram Raya sebagai pusat pertumbuhan di Kepulauan Nusa Tenggara. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga menyatakan, saat ini salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan infrastruktur adalah masih terjadinya ketimpangan atau kesenjangan antarwilayah.

"Hal itu dapat dilihat dari besaran produk domestik regional bruto (PDRB), yakni jumlah PDRB Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera setara 81,98 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, sedangkan sisanya (18,02 persen,-red) itu tersebar di wilayah Timur Indonesia lainnya," ungkap Agusta saat membuka dan menyampaikan arahan pada "Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Metropolitan Mataram Raya sebagai Pusat Pertumbuhan Kepulauan Nusa Tenggara" di Jakarta, Rabu (18/7). **(ris/infoBPIW)**



BPIW dan Bappenas Siapkan Perencanaan Pengembangan 40 Kota Berkelanjutan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini menyiapkan perencanaan pengembangan terpadu dan terintegrasi terhadap 40 kota sebagai kota berkelanjutan di Tanah Air.

Hal itu terungkap dalam pembahasan “*National Urban Development Program (NUDP)*» yang dipimpin langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono didampingi jajarannya dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas, Rudy S. Prawiradinata, Ph.D. di Kantor BPIW, Jakarta, Selasa (4/9). **(Ris/Eko/infoBPIW)**



Pengembangan TOD Butuh Sinergitas

Pengembangan *Transit Oriented Development (TOD)* memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta badan usaha. Terlebih, lahan perkotaan saat ini semakin terbatas yang berpotensi menjadi kendala dalam pengembangan kawasan TOD, ungkap Hadi Sucahyono dalam *Focus Group Discussion (FGD)* “Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Daerah Berbasis TOD di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur” yang diselenggarakan BPIW kerjasama The HUD Institut di Jakarta, Rabu (28/11). **(ris/infoBPIW)**

Sinkronisasi Program Infrastruktur PUPR/ Program Jangka Pendek



BPIW Koordinasikan Program Jangka Pendek 2021-2023

BPIW melakukan Rapat Koordinasi Penajaman Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2021-2023 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR. Kegiatan yang berlangsung mulai 4 hingga 6 Juni di Jakarta dibuka Plt. BPIW Lana Winayanti.

Menurut Lana rapat ini merupakan upaya mewujudkan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR melalui proses perencanaan dan pemrograman pembangunan efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

"Kita harapkan proses tersebut bersumber dari dokumen perencanaan dan pemrograman yang semakin berkualitas, dan proses sinkronisasi pemrograman dan pembiayaan yang semakin baik," ujar Lana. **(Hen/infobpiw)**



BPIW Samakan Persepsi untuk Menentukan Program Prioritas di Kementerian PUPR

Guna menyamakan persepsi dalam menentukan program dan pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek (PJP) 2021-2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPIW menggelar "Rapat Koordinasi Pengembangan Indikator Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2021-2023 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR" di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri seluruh perwakilan Unit Organisasi (Unor) teknis di Kementerian PUPR, yakni perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan. **(ris/InfoBPIW)**

BPIW Siapkan Usulan Rencana Kerja 2020 dan PJP 2021-2023

Dalam rangka mempersiapkan serta mematangkan usulan rencana kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran (TA) 2020 dan Program Jangka Pendek (PJP) 2021-2023, BPIW sebagai unit organisasi eselon I yang bertugas menyusun perencanaan di Kementerian PUPR menggelar "Rapat Pembahasan Draft Awal Program Jangka Pendek 2021-2023" di Jakarta, Senin (6/8).

Kepala Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan BPIW Iwan Nurwanto mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menginformasikan draft program arahan TA 2020 di intern BPIW. "Pada kegiatan ini dilakukan juga validitas terhadap draft program arahan TA 2020. Termasuk, pemutakhiran data, melakukan seleksi serta prioritas terhadap draft program arahan TA 2020," terang Iwan. **(ris/infoBPIW)**



Sinkronisasi Program Jawa-Bali Digelar



Isu strategis pengembangan infrastruktur wilayah di Pulau Jawa dan Bali meliputi, penyelesaian pembangunan *Asian Highway Network*, mengurangi disparitas wilayah selatan dan utara Jawa-Bali, penanggulangan krisis air, penyelesaian proyek strategis nasional, merespon Tren Urbanisasi, dan pengurangan resiko atau mitigasi bencana di Pulau Jawa-Bali.

Untuk program pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 yakni, penataan kawasan wisata religi dudan Kota Magelang, pembangunan Jalan Malangsari menuju Kendenglembu di Kabupaten Banyuwangi, dan

pembangunan rumah susun untuk mendukung kegiatan di Kawasan Industri (KI) Kendal.

Demikian sejumlah isu strategis tersebut terungkap dalam Pembahasan Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023 untuk Pulau Jawa dan Bali yang digelar Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Solo, Jawa, beberapa waktu lalu. **(ris/infoBPIW)**

BPIW Dukung Infrastruktur di Pulau Kalimantan

Sejumlah isu strategis infrastruktur di Pulau Kalimantan antara lain, dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kawasan perbatasan, peningkatan konektivitas Tanah Kuning dan dukungan infrastruktur terhadap pengembangan kawasan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Berau dan KPPN Kutai Timur.

Kemudian ada isu strategis infrastruktur peningkatan konektivitas dari Palangkaraya menuju Batas Provinsi Kalimantan Barat.

Sejumlah isu strategis itu dibahas dalam Pembahasan Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023 untuk Pulau Kalimantan yang digelar BPIW Kementerian PUPR. **(ris/infoBPIW)**



Pelaksanaan Pra Konreg 2018



BPIW Mantapkan Persiapan Pra Konreg 2018

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar pembahasan pendahuluan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dengan Unit Organisasi (Unor) teknis di lingkungan Kementerian PUPR.

“Pembahasan materi pendahuluan Pra Konreg dilaksanakan dengan Unor-unor teknis, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan. Kegiatan ini merupakan persiapan pelaksanaan Pra Konreg yang akan digelar mulai awal Februari nanti,” ungkap Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saat membuka Pembahasan Pendahuluan Pra Konreg BPIW dengan Unor di Jakarta, Kamis (4/1).



Program PUPR 2019 Mendukung Pengentasan Kemiskinan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Hal itu dilakukan dengan program infrastruktur berbasis masyarakat (Padat Karya).

Selain itu kebijakan tersebut untuk menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. Demikian disampaikan saat membuka *Kick Off* atau Pembukaan Konsultasi Regional penyusunan program 2019 di Semarang, (12/2). **(Hen/Ind/Ris/InfoBPIW)**

Sekjen PUPR : Pembangunan Infrastruktur Harus Tepat Waktu

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Prof. Anita Firmanti menyatakan pembangunan infrastruktur harus diselesaikan tepat waktu dan tidak ada yang mangkrak (terbengkalai, red). Hal itu disampaikan kepada seluruh peserta, saat membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) di Kendari, Rabu (21/2) malam.

Pra Konreg ini membahas program infrastruktur untuk tahun 2019 di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam kesempatan itu, Anita juga menyampaikan pesan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bahwa tidak ada proyek *multiyears* yang diprogramkan untuk tahun 2019 kecuali bendungan. **(Hen/Ind/InfoBPIW)**





2019, Proyek Infrastruktur Prioritas di Kalimantan dan Nusa Tenggara Ditargetkan Rampung

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad menyelesaikan seluruh proyek infrastruktur prioritas di provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara pada 2019. Pasalnya, saat itu merupakan periode akhir dari lima tahun pemerintahan, sehingga tahun 2019 ditetapkan sebagai tahun penyelesaian.

Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono dalam pembukaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu malam (28/2). Pra Konreg untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara tersebut dilaksanakan mulai 28 Februari hingga 2 Maret 2018. **(ris/hen/ind/infoBPIW)**

Pra Konreg 2018 Kementerian PUPR Berakhir di Jambi

Kementerian PUPR kembali menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg). Kali ini, Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sumatera dilaksanakan di Jambi, Rabu malam (7/3). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian akhir dari Pra Konreg 2018, setelah sebelumnya digelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa-Bali di Semarang, Pra Konreg untuk provinsi wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua di Kendari dan Pra Konreg untuk provinsi wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara di Banjarmasin.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono menegaskan, jajarannya pada tahun 2019 berupaya keras akan menyelesaikan seluruh proyek infrastruktur prioritas di provinsi wilayah Sumatera. **(Ris/Hen/Ind/indoBPIW)**



Koordinasi dengan Pemda/DPRD/DPR

Kunjungi BPIW, Pemkab Lingga Berharap Dukungan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berharap dukungan pemerintah pusat dapat semakin bertambah dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Demikian disampaikan Bupati Lingga, Alias Wello saat melakukan kunjungan kerja didampingi jajarannya ke Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (16/3).

Kunjungan kerja Pemkab Lingga tersebut diterima langsung Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto didampingi jajaran pejabat di BPIW. **(ris/infoBPIW)**



Terkait DAK, Pemkab Garut Kunjungi BPIW untuk Konsultasi

Wakil Bupati Kabupaten Garut, Helmi Budiman beserta jajarannya melakukan kunjungan kerja ke kantor BPIW. Kunjungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bertujuan untuk melakukan konsultasi, guna mendapatkan masukan dari Kementerian PUPR terkait pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di daerahnya.

Helmi mengatakan, sebanyak 82 persen wilayah Garut merupakan kawasan lindung dan konservasi. "Kawasan di Garut yang dapat dikembangkan pun menjadi sangat terbatas", ujar Helmi. Selain itu, Garut memiliki peringkat ke tiga nasional sebagai wilayah yang memiliki kerawanan terhadap bencana. **(ind/infoBPIW)**



Kementerian PUPR Prioritaskan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas di Kalteng

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan sistem konektivitas nasional di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019 sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalteng.

"Salah satunya melakukan dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global," ungkap Agusta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) Provinsi Kalteng, Kamis (5/4). **(miqdam)**



Program Infrastruktur 2019 Drealisasikan Melalui Keterpaduan Antarsektor dan Antarpemerintah



Pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan antarpemerintah, seperti yang akan dilakukan di Provinsi Jambi. Menurut Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Bobby Prabowo terdapat beberapa pembangunan usulan keterpaduan antarsektor PUPR di provinsi Jambi.

“Keterpaduan antarsektor ini merupakan hasil dari pelaksanaan Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg, yang telah digelar di Kota Jambi, 7-9 Maret lalu,” ujar Bobby saat memberikan paparan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi, Kamis (5/4). **(Fin/Hendra/infobpiw)**

Kunjungi BPIW, DPRD Kota Pangkalpinang Koordinasikan Program infrastruktur

Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung melakukan kunjungan ke kantor BPIW Kementerian PUPR, Jumat (20/7). Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Satriya Mardika menjelaskan kunjungan tersebut untuk melakukan koordinasi terkait sinkronisasi program pembangunan infrastruktur sektor PUPR.

Selain itu menurut Satriya, pihaknya juga ingin mengetahui sampai sejauhmana program pemerintah pusat direalisasikan di daerahnya. Salah satu program infrastruktur PUPR yang diusulkan untuk diakomodir dari direalisasikan adalah pembangunan embung atau penampungan air. Satriya menjelaskan komisinya telah menyetujui langkah Pemerintah Kota yang menyediakan lahan seluas 30 hektar untuk pembangunan embung tersebut. Pembangunan embung menurut Satriya dapat berdampak positif bagi masyarakat di kotanya. **(Hen/infobpiw)**



Dukung NYIA, Kementerian PUPR Siapkan Pengembangan Infrastruktur

BPIW berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tepatnya, pengembangan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) dengan akan hadirnya Bandara Kulon Progo.

"Infrastruktur PUPR yang dibutuhkan tersebut, antara lain akses penghubung Bandara (Kulon Progo,-red)-Borobudur, akses Bandara (Kulon Progo,-red)-Kota Yogyakarta. Kemudian, pembangunan Bendung Kamijoro di Kabupaten Bantul dan *intake* untuk pemenuhan air baku jangka pendek," ungkap Bobby saat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY di ruang rapat BPIW, Jakarta, Selasa (24/4) . **(ris/infoBPIW)**



Tahun 2019, BPIW Fokus Dukung Realisasi Program Prioritas Nasional

BPIW pada tahun 2019 komitmen mendukung untuk mewujudkan prioritas nasional pemerintah yang bertema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, prioritas nasional 2019 yakni, Pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

"Ketiga peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air," ungkap Hadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI mengenai Pembahasan Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program masing-masing unit Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran (TA) 2019. **(ris/infoBPIW)**



Kunjungi BPIW, Komisi III DPRD Kabupaten Banjar Ungkap Kebutuhan Infrastruktur di Daerahnya

BPIW menerima kunjungan dari komisi III DPRD Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, di ruang rapat BPIW, Jakarta, Jumat (5/10).

Wakil Komisi III DPRD Banjar Ahmad Rozani menjelaskan tujuan dari kunjungan itu adalah untuk berkonsultasi terkait pengembangan infrastruktur di daerahnya. "Pada intinya, kami sebagai wakil rakyat ingin membantu pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur dan meminta saran kepada BPIW, langkah seperti apa yang harus dilakukan untuk membangun daerah," tutur Rozani.

Ia mengakui saat ini, masih ada beberapa infrastruktur yang harus dibangun seperti gedung perkantoran dan perlunya pelebaran jalan. Hal ini mengingat beberapa ruas jalan terlihat sempit, sehingga perlu diperlebar. **(Ind/infobpiw)**



Kementerian PUPR Siapkan Dukungan Infrastruktur Untuk Pengembangan KEK Tanjung Lesung

Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan perwakilan beberapa unit organisasi (unor) di Kementerian PUPR, Senin (23/7). Wakil Ketua Komisi III, H.Dadan Sudarma menjelaskan kunjungan ke BPIW untuk membahas beberapa hal, salah satunya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

“Kita perlu mengetahui hal itu, karena beberapa kalangan masyarakat di daerah kita mempertanyakan masalah tersebut. Apalagi belum seluruh lahan yang dibebaskan, karena baru daerah Bojong yang dibebaskan lahannya. Sedangkan di Pagelaran dan Panimbang belum dibebaskan,” ungkapnya. **(Hen/infobpiw)**



BPIW Siap Mendukung Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten MTB

BPIW memastikan siap mendukung pengembangan infrastruktur PUPR terpadu di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku.

Kepala BPIW Hadi Suchayono mengatakan, pengembangan infrastruktur PUPR terpadu tersebut mulai dari pengembangan konektivitas, pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan sumber daya air serta

penyediaan perumahan. “Pada tahun 2019, ada program pengembangan konektivitas berupa pemeliharaan rutin sepanjang 1838 KM, rehabilitasi 1 KM, rekonstruksi 27.2 KM serta penggantian jembatan 27.4 KM,” ungkap Hadi saat menyambut kunjungan kerja Bupati MTB, Petrus Fatlolon yang didampingi jajarannya di Jakarta, Senin (10/8). **(ris/infoBPIW)**

Pagu Rp 228 Miliar, BPIW Siap Jalankan Program 2019

BPIW mendapatkan pagu sebesar Rp 228 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 ditetapkan Komisi V DPR RI. Kepala BPIW, Hadi Suchayono memaparkan, pagu anggaran BPIW 2019 akan dialokasikan antara lain untuk kajian dan perencanaan di Kawasan Perbatasan Negara sebesar Rp 18,6 miliar, Perubahan Iklim, Mitigasi, Bencana, Cagar Budaya dan Kawasan Konservasi sebesar Rp 9,8 miliar, Isu Pembangunan Perkotaan Rp 25,5 Miliar, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Bagian Indonesia Timur Rp 10,5 miliar, Ekonomi dan Logistik, Pengembangan Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri Rp 36,6 miliar dan lainnya,” terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa (3/10). **(ris/infoBPIW)**



Pengembangan Inkubasi Anjungan Cerdas/*Integrated Rest Area*



Integrated Rest Area di Jembrana Bali Siap Dimanfaatkan

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah mengembangkan anjungan cerdas (*integrated rest area*) yang berada di jalan nasional. Sampai saat ini ada dua *integrated rest area* yang menjadi *pilot project* atau percontohan, yakni di Rambut Siwi, Jembrana, Bali dan Trenggalek, Jawa Timur. "Integrated rest area yang kita rancang itu sebagai contoh, sehingga bisa direplika unit organisasi lain," ujar Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Suahyono, Kamis (29/3).

Dari 2 *rest area* itu, maka yang ada di Bali pembangunannya sudah mencapai 97 persen. Saat ini menurut Hadi sedang dilakukan percobaan operasional beberapa komponen seperti air dan lampu. "Kemungkinan bulan depan bisa dioperasikan dan kita mohon perkenanan Menteri PUPR untuk dapat meresmikannya," ucap Hadi. **(Hen/infobpiw)**

Integrated Rest Area yang Dibangun Kementerian PUPR Mendapat Respon Positif dari Bupati Jembrana



Bupati Jembrana Bali I Putu Artha optimis *integrated rest area* atau anjungan cerdas yang dibangun Kementerian PUPR, dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke daerahnya dan memberikan dampak bagi perekonomian di sekitar kawasan tersebut. Ia pun berkomitmen bahwa pemerintah Kabupaten Jembrana siap mendukung rencana operasionalisasi anjungan yang

bangunan utamanya telah selesai. ujar I Putu Artha saat menerima perwakilan dari BPIW. (9/4).

"Anjungan yang dibangun ini merupakan penghargaan yang luar biasa dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR bagi kemajuan daerah kami," ucapnya bangga. **(Ing/Hen/infobpiw)**

Integrated Rest Area Diharapkan Segera Resmi Beroperasi

Integrated Rest Area yang diinisiasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan segera diresmikan operasionalnya, agar manfaatnya dapat segera dinikmati khalayak umum.



Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, saat ini Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW telah melaporkan perkembangan terakhir *Integrated Rest Area* Rambut Siwi di Bali dan rencana pengelolaannya kepada Sekretariat BPIW. ([ris/infoBPIW](#))

BPIW Matangkan Persiapan Pengelolaan *Integrated Rest Area* Rambut Siwi

Menjelang peresmian *Integrated Rest Area*/Anjungan Cerdas Rambut Siwi di Provinsi Bali, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memantapkan persiapan pengelolaan Anjungan Cerdas tersebut dengan menggelar "*Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Business Plan Integrated Rest Area/Anjungan Cerdas Rambut Siwi*" di Bali, Rabu (25/7).

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, Asosiasi Komunitas Kuliner Jembrana, Asosiasi Komunitas Kerajinan Jembrana, Asosiasi Perhotelan dan Restoran Jembrana, Asosiasi Komunitas Seni Budaya Jembrana, Akademisi dan para Kepala Desa di sekitar Anjungan Cerdas Rambut Siwi.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono saat menyampaikan arahan mengatakan, Kementerian PUPR melalui BPIW terus memantapkan persiapan pengelolaan Anjungan Cerdas Rambut Siwi seiring selesai proses pembangunannya. ([ris/infoBPIW](#))



Penanganan Pasca Bencana di Lombok & Palu

Kunjungi Posko CPNS, Kepala BPIW Jelaskan Program Jangka Menengah dan Panjang Untuk Lombok

Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono melakukan kunjungan ke Posko Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di areal pengungsian di Pulau Lombok, Jumat (14/9). Ia berkunjung ke Posko CPNS di Gunung Sari di Kabupaten Lombok Barat dan di Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Hadi menjelaskan bahwa selain menangani pembangunan infrastruktur pasca gempa, Kementerian PUPR perlu membuat program untuk jangka menengah dan panjang seluruh kawasan yang terintegrasi dengan penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika atau Lombok. **(Hen/ajeng/infobpiw)**



JICA Berkoordinasi dengan BPIW Terkait Penanganan Sulawesi Tengah Pasca Bencana Alam

International Cooperation Agency (JICA) melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Jumat (9/10) sore lalu. Koordinasi dilakukan terkait rencana JICA yang akan melakukan pengeboran di beberapa tempat di Sulawesi Tengah, pasca terjadinya bencana alam pada 28 September lalu. Pemimpin rombongan JICA, Hitoshi Ara menjelaskan pengeboran tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi tanah pasca likuifaksi. **(Hen/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Siapkan Rencana Detail Relokasi Hunian Penduduk Pasca Gempa di Palu-Donggala

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang menyiapkan rencana detail relokasi hunian penduduk pasca gempa di Palu-Donggala, yang terjadi beberapa waktu lalu. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menjelaskan BPIW telah diberi amanat oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono untuk menyiapkan rencana detail relokasi hunian penduduk tersebut.

Dalam kunjungan Sekjen PBB yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Hadi menyatakan, relokasi hunian direncanakan untuk masyarakat terdampak gempa dan tsunami agar diarahkan sesuai zona aman dari gempa. Mengingat bahwa sebagian besar permukiman tersebut terjadi gerakan di bawah permukaan tanah yang menyebabkan pergeseran atau disebut likuifaksi tanah. **(hen/infoBPIW)**



Kementerian PUPR Siapkan Rencana Tapak Untuk Relokasi Hunian di Palu, Donggala, dan Sigi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan menyiapkan *site plan* rencana tapak untuk relokasi penduduk yang terkena dampak bencana di Palu, Donggala, dan Sigi.

Adapun *site plan* tersebut dilakukan untuk lokasi yang telah diidentifikasi layak untuk dihuni. Ada empat yang jadi alternatif relokasi tersebut yakni di kawasan Duyu, Tondo, Pembeda, serta Kab Petobo. Hal ini disampaikan Kepala BPIW, Hadi Suahyono kepada wartawan saat jumpa pers di Palu, Senin (22/10). Rencana tapak ini merupakan tindak lanjut dari rencana induk relokasi penduduk. **(Aji/Hen/infobpiw)**



Komisi V DPR RI Dukung Percepatan Pembangunan Kembali Jembatan Kuning di Palu

Pada tanggal 29 November 2018 telah dilaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo di kota Palu, Sulawesi Tengah. Rombongan meninjau Jembatan Palu IV (Jembatan Kuning) yang runtuh diterjang tsunami yang melanda Palu, Sigi dan Donggala pada tanggal 28 September 2018.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan XIV Palu, A. Satriyo Utomo mengatakan jembatan yang biasa disebut "Jembatan Kuning" ini, ke depannya akan dibangun dan ditata kembali kawasannya agar dapat menjadi ikon baru Kota Palu. "Untuk transportasi logistik akan dibangun jembatan baru yang berjarak kurang lebih 500 meter dari jembatan kuning" kata Satriyo. **(Birkompu PUPR)**



Peta Mikrozonasi Diperlukan Untuk Melihat Potensi Gempa

Mikrozonasi adalah salah satu teknik untuk membagi suatu zona yang besar menjadi zona-zona kecil dengan kriteria masing-masing zona akan berbeda tergantung tujuan zonasi itu sendiri.

Menurut Prof. R. Arif Sabarudin dari Puslitbang Perumahan Permukiman, Balitbang, salah satu yang dimuat dalam peta mikrozonasi adalah potret kondisi tanah bergerak dan jenis tanah di permukaan. Dengan demikian diketahui daerah mana yang dianggap zona merah atau daerah patahan. **(Hen/Mangapul/infoBPIW)**





BPIW Siapkan *Site Plan* Untuk Mendukung Relokasi Penduduk Pasca Bencana Palu, Donggala, dan Palu

Bertempat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Rabu (31/10) digelar rapat laporan perkembangan penyusunan rencana induk dan penetapan alternatif lokasi hunian tetap di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam rapat yang dipimpin Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro ini disepakati pendalaman hasil survei lapangan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai dasar penentuan lokasi yang layak sebagai kawasan relokasi.

Ada tiga tempat yang dijadikan kawasan relokasi yakni kawasan Duyu, Tause dan Tondo, Serta Pombewe. Dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil ini, diputuskan mengenai pentingnya *law enforcement* atau penegakan hukum untuk menghindari penduduk bermukim di kawasan rawan bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. **(Hen/infoBPIW)**

Kepala BPIW: Masukan Para Ahli Geologi Sangat Diperlukan Dalam Rekonstruksi Palu dan Sekitarnya

Pemerintah menyiapkan *masterplan* dan *site plan* relokasi penduduk yang terdampak bencana gempa Palu. Dalam menentukan tempat hunian baru, diperlukan kajian geologi yang komprehensif agar lokasi tersebut aman dan nyaman untuk ditinggali. Oleh karenanya, BPIW akan bekerja sama dengan para geologis atau ahli geologi untuk menentukan arahan pengembangan infrastruktur di daerah terdampak bencana dengan berdasarkan hasil analisa geologi.

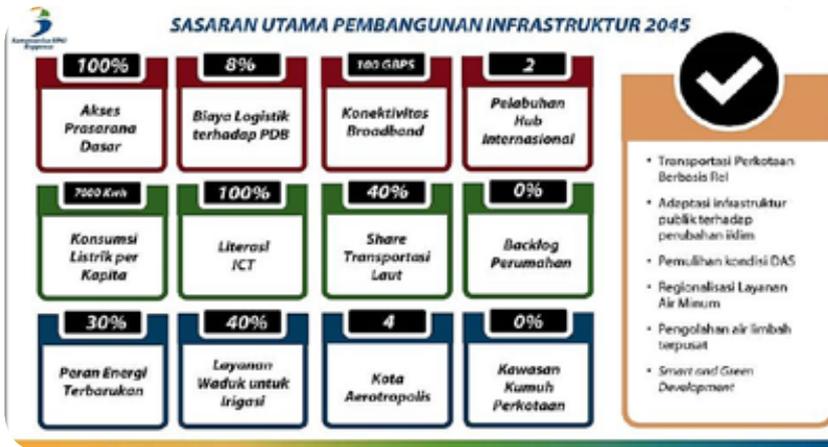
“Masukan dari para ahli geologi, baik praktisi maupun akademisi, sangat diperlukan untuk kembali membangun Palu dan sekitarnya.” ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono saat berbicara di sela-sela *Special Discussion* Gempa Palu pada Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Pekanbaru (1/11). **(Indra/Hen/infoBPIW)**



Penanganan Palu Butuh Peran Multipihak

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, upaya relokasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena bencana di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih cepat, kalau terbentuk komitmen multipihak yang terimplementasikan secara baik di lapangan.

“Multipihak tersebut mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan filantropi atau donatur, perguruan tinggi serta masyarakat luas,” ungkap Hadi saat berbicara dalam *Focus Group Discussion* (FGD) “Multipihak dalam Rekonstruksi Pasca Bencana yang Lebih Baik,” di Jakarta, Rabu (6/12). **(Ris/infoBPIW)**



BPIW Arahkan Pengembangan Infrastruktur PUPR Penuhi 3 Unsur Sasaran

Arah kebijakan nasional infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke depan dititikberatkan pada tiga hal, yakni pengembangan infrastruktur untuk penunjang pemberantasan kemiskinan, penunjang bangkitan ekonomi masyarakat serta penunjang dalam mengurangi kesenjangan antar kawasan.

Demikian diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat membuka Pembahasan Arah Kebijakan Nasional Bidang Infrastruktur PUPR di Bandung, (25-26/1). ([ris/ infoBPIW](#))

Inovasi Sistem Pendukung Perencanaan Infrastruktur PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR kembali membuat inovasi. Kali ini, BPIW menciptakan aplikasi sistem informasi baru, yakni Sistem Informasi dan *Data Base Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (Sibas Ripi).

Inovasi terbaru BPIW tersebut diungkapkan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo dalam Sosialisasi Sibas Ripi kepada jajaran pejabat BPIW di Semarang, ([ris/ infoBPIW](#))



BPIW Terus Sempurnakan Aplikasi SIPro

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR terus berupaya melakukan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Pemrograman (SIPro).

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Iwan Nurwanto mengatakan, ke depan proses pengolahan data di bidang penyusunan program dan pembiayaan harus lebih canggih.

“Diantaranya mengolah data presentase secara detail, seperti perbandingan antara jumlah program arahan, *program comitted*, *program directif* dan manajemen *asset*,” ungkap Iwan saat menyampaikan arahan pada “Pembahasan Progres Pengembangan SIPro” di Bogor. ([Disa/infoBPIW](#))





Tahun 2019, BPIW Tingkatkan Kolaborasi Antar Unit Kerja

BPIW menyiapkan strategi dalam menjalankan program dan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2019. BPIW memastikan dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja TA 2019 akan terus meningkatkan kolaborasi yang melibatkan lintas unit kerja.

"Kolaborasi harus menjadi kata kunci dalam setiap kegiatan yang dilakukan BPIW," ungkap Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu dalam acara "Persiapan Program dan Kegiatan BPIW TA 2019" di Bandung, Kamis, (11/9). **(ris/infoBPIW)**



Kementerian PUPR Peringati Hari Pahlawan : Semangat Pahlawan Menjadi Keuletan Dalam Melaksanakan Pembangunan

Kementerian PUPR, menggelar upacara bendera memperingati Hari Pahlawan di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin (12/11) pagi, dan bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala BPIW, Hadi Suchayono. Sedangkan bertindak sebagai Komandan Upacara Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Agusta Persada Sinulingga. Upacara diikuti oleh Pejabat Tinggi Madya, Pratama, serta pegawai Kementerian PUPR. Dalam upacara tersebut Inspektur Upacara membacakan

sambutan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tema Hari Pahlawan Tahun 2018 adalah "Semangat Pahlawan Di Dadaku" mengandung makna sesuai fitrahnya dalam diri setiap insan tertanam nilai-nilai kepahlawanan," oleh karenanya siapapun dapat menjadi pahlawan, setiap warga Negara Indonesia tanpa kecuali dapat berinisiatif mengabdikan hal yang bermanfaat untuk kemashlahatan diri, lingkungan sekitar, bagi bangsa dan Negara," terangnya. **(Iwn)**



BPIW Berperan Wujudkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Pasalnya, BPIW berperan untuk memastikan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Dengan pembangunan yang terpadu, akan membuat belanja infrastruktur yang dilakukan negara menjadi efektif dan efisien,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/2). **(ris/infoBPIW)**

42 CPNS Laksanakan Habitiasi di BPIW

Sebanyak 42 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 yang memasuki masa habituasi di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) diminta untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Pasalnya, tantangan tugas Kementerian PUPR, termasuk BPIW akan semakin kompleks.

Hal itu ditegaskan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu saat memberikan arahan dalam acara “Habitiasi CPNS 2017”, di Kantor BPIW, Senin (26/2). **(ris/infoBPIW)**



Tingkatkan Etos Kerja, BPIW Gelar Pelatihan *Personal Branding*

Seluruh jajaran BPIW perlu terus mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan berbagai pihak terkait. Dengan begitu produk BPIW bisa menjadi acuan bagi semua Unit Organisasi (Unor) di Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain dalam pengembangan infrastruktur agar lebih terpadu.

“Saat ini, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,-rd) sudah mengadopsi perencanaan dan *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) yang dihasilkan BPIW untuk perencanaan K/L terkait. Hal ini menunjukkan bahwa BPIW sudah mulai menunjukkan perannya,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Lana Winayanti saat membuka acara “*Personal Branding* dalam Meningkatkan Sinergi dan Etos Kerja Organisasi”, di Bogor. **(bri/InfoBPIW)**





Dukung Capaian Organisasi, BPIW Tingkatkan Etos Kerja Pegawai

BPIW memiliki salah satu fungsi sebagai lembaga kajian dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk pimpinan, sehingga jajaran BPIW harus banyak diskusi dan banyak berpikir. Demikian disampaikan Sekretaris BPIW Firman H. Napitupulu saat membuka acara “Penguatan Etos Kerja dalam Mendukung Capaian Organisasi” di Jakarta.

Firman menuturkan, jajaran BPIW juga harus cakap dalam melakukan komunikasi. “Jadi kita harus mampu menyampaikan sesuatu dengan terbuka terkait kemampuan serta kompetensi kita masing-masing. BPIW bergantung pada kemampuan setiap individu di dalamnya untuk menyampaikan sesuatu, walaupun tetap satu pengambil keputusan yaitu kepala badan,” terang Firman. **(bri/infoBPIW)**

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Gelar Pengembangan Kapasitas SDM

Demi mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR menggelar “Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)” di Kabupaten Kuningan, beberapa waktu yang lalu.

Acara ini dihadiri Kepala BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dan jajaran di lingkungan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono menyatakan, untuk meningkatkan kinerja BPIW tentu sangat memerlukan kerja sama antar pegawai, antar bidang hingga antar pusat. “Kerjasama yang baik menjadi kunci untuk dapat meningkatkan kinerja,” ujar Hadi **(rizkita/infoBPIW)**



BPIW Berkomitmen untuk Terus Membangun Budaya Kerja yang Kondusif

Sekretariat BPIW berkomitmen untuk terus membangun budaya kerja yang kondusif di lingkungan BPIW. Sekretaris BPIW, Firman H. Napitupulu mengatakan, esensi pengelolaan negara yang efektif dari sisi manajemen memiliki peran dalam menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas organisasi kerja. Salah satunya melalui budaya kerja yang kondusif.

“Unit organisasi yang memiliki SDM bagus dan anggaran besar tidak menutup kemungkinan mengalami kegagalan, karena budaya kerja yang tidak sesuai tujuan organisasi. Sebaliknya, unit organisasi yang sama, dengan anggaran seadanya dapat tumbuh baik karena ada budaya kerja yang kondusif,” ungkap Firman saat membuka acara Internalisasi dan Dukungan Dimensi Religi dalam Penerapan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIW, di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. **(ris/bil/InfoBPIW)**





Memperkaya Pengalaman Pengembangan Perkotaan Melalui *Public Lecture*

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, menggelar *Public Lecture "Best Practice of Transformative City and Regional Development in Global Experience"*, Senin (12/11). Saat membuka kegiatan tersebut Kepala BPIW, Hadi Sucahyono menyatakan kegiatan tersebut merupakan sarana untuk dapat memperkaya

pengalaman terkait pengembangan perkotaan. Apalagi dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Malaysia.

"Untuk membangun kota yang lebih baik harus dapat mempelajari *Sustainable Development Goals* dan *New Urban Agenda*," ungkap Hadi. **(Rosita/Hen/infobpiw)**



Dengan Terus Berkolaborasi, BPIW Dapat Konsisten Berkontribusi pada Pembangunan

Seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPIW) harus terus bekerja keras untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kepala BPIW Hadi Sucahyono meyakini dengan terus berkolaborasi, BPIW dapat konsisten berkontribusi pada pembangunan di seluruh tanah air. "Kita semua adalah sama. Kita harus

lebih baik lagi, sehingga dapat terus berkontribusi untuk pembangunan negara kita. Bila pembangunan negara kita menjadi lebih baik, maka ada kontribusi Kementerian PUPR termasuk BPIW," ujar Hadi saat membuka kegiatan Optimalisasi Kinerja Pegawai Melalui Kolaborasi dalam Mendukung Layanan Terpadu BPIW Kementerian PUPR, di Bogor (7/12). **(Hen/ris/infoBPIW)**

Hadi Sucahyono Pimpin BPIW Kementerian PUPR

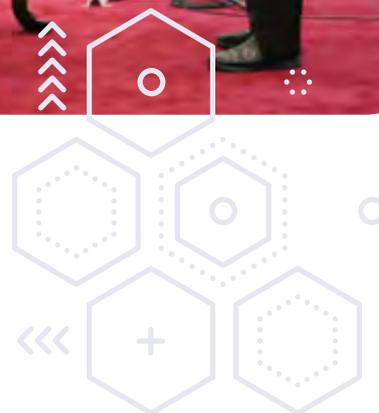


Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini memiliki pemimpin baru.

Kepala BPIW Kementerian PUPR saat ini dijabat, Hadi Sucahyono setelah sebelum dijabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW, Lana Winayanti.

Hadi Sucahyono sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala BPIW tersebut dilakukan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di ruang Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (20/7). (**ris/infoBPIW**)



Kepala BPIW: Harus Terus Berkoordinasi Untuk Hasilkan Produk Berkualitas

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyatakan seluruh unit kerja di BPIW harus terus melakukan koordinasi dan kolaborasi agar terus menghasilkan produk-produk yang berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan, terutama oleh unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR.

"Kita harus tunjukkan bahwa produk kita berkualitas, baik yang sudah dilakukan maupun yang sedang dilakukan, misalnya *Review Rencana Strategis* atau *Renstra* Kementerian PUPR, penajaman program untuk tahun 2019, dan perencanaan program jangka menengah 2020-2024," ujar Hadi saat memberi kata sambutan pada acara serah terima jabatan di lingkungan BPIW, Kamis (26/7).

Program lain yang perlu didorong dan dipercepat menurut Hadi adalah penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP), di mana BPIW dipercaya pemerintah untuk mengawal penyusunan ITMP tersebut di tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Mandalika/Lombok, dan Borobudur. Penyusunan ITMP ini dapat dukungan dana dari Bank Dunia. (**Hen/infoBPIW**)





Pejabat Pengawas BPIW Diharapkan Menjaga Kinerja dan Loyalitas

Pejabat Pengawas di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan selalu menjaga kinerja dan loyalitas serta kredibilitas agar tetap baik. Selain itu para pejabat hendaknya mempunyai kemampuan, kemauan dan memiliki wawasan luas ke depan serta mampu melakukan terobosan positif melalui upaya pemikiran yang kreatif, inovatif, dan sistematis.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah, at atan serta serah terima jabatan, di ruang Sapta Taruna, Kementerian PUPR, Kamis (13/12). **(Hen/infobpiw)**





Penyusunan MPDP KPPN

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) tahun 2018 ini sedang menyusun *masterplan* dan pra-de-sain yang akan menjadi arah pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Tujuan dari KPPN adalah mewujudkan kemandirian dan menciptakan desa mandiri berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta keterkaitan kegiatan ekonomi desa-kota.

Prinsip-Prinsip Penyusunan Masterplan

- 1. KPPN Harus dikembangkan Sesuai Fungsinya**
 - Kawasan agropolitan/minapolitan/pariwisata
 - Pusat pengolahan dan pemasaran
 - Kawasan permukiman
- 2. Jangka Waktu Master Plan**
 - Jangka pendek (1 tahun)
 - Jangka menengah (5 tahun)
 - Jangka panjang (10 tahun)
- 3. Muatan Master Plan**
 - Lintas Sektor
- 4. Pembiayaan**
 - APBN, APBD I, APBD II, investor, masyarakat
- 5. Pelaksanaan**
 - Terpadu & terintegrasi -> MP merupakan dokumen kesepakatan
- 6. Leading Sector**
 - Pemerintah kabupaten

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

Berikut MPDP KPPN yang sudah disusun oleh BPIW tahun 2018 :

KPPN **Konawe Selatan**

KPPN **Bengkayang**

KPPN **Lombok Tengah**

KPPN **Muna Barat**

KPPN **Boalemo**

KPPN **Ngada**

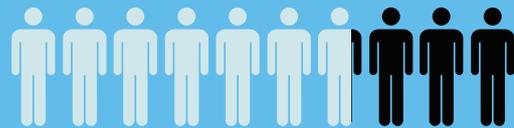
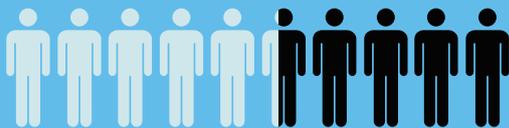


Penyusunan MPDP Kota Baru

Saat ini pusat aglomerasi penduduk perkotaan di Indonesia 59% terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara kota-kota Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sejalan dengan agenda Nawacita ke-3, yaitu memulai pembangunan dari pinggiran serta mengurangi kesenjangan antara Indonesia bagian Barat dan Timur, pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan baru skala besar, yaitu sebagai *counter magnet* bagi kota-kota inti, sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan permukiman (khususnya *housing backlog*).

Dalam RPJMN 2015-2019 dirumuskan kebijakan berupa pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan sebagai alternatif penanganan isu strategis tersebut. Tahun ini BPIW menyusun 2 *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) kota baru.

Kondisi Faktual Perkotaan di Indonesia



Kota terus tumbuh sejalan dengan perkembangan kegiatan secara alamiah

Kota-kota di Indonesia telah mengalami perkembangan yang seringkali tidak memperhatikan kemampuan yang dimiliki, keseimbangan dan keserasian dari kota itu sendiri

Dibutuhkan upaya untuk menata kota dan mengembangkan infrastruktur menuju keseimbangan kota dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan

Kota Baru

Berikut MPDP Kota Baru yang sudah disusun oleh BPIW tahun 2018 :

Kota Baru Padang

Kota Baru Banjar Baru



Beberapa Kegiatan Strategis BPIW 2018

Penyusunan ITMP

BPIW menyusun rencana induk pariwisata terintegrasi (*Integrated Tourism MasterPlan/ITMP*) di tiga destinasi wisata prioritas nasional. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Dalam pengembangan pariwisata melalui ITMP dilakukan kerjasama Pemerintah RI dengan World Bank.

Ruang Lingkup Penyusunan ITMP

1. --- Analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan
2. --- Analisis permintaan dan peluang pengembangan daerah tujuan wisata
3. --- Analisis kondisi awal (baseline) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur dan obyek wisata serta fasilitas bagi pengunjung
4. --- Artikulasi peluang dan hambatan lingkungan, sosial, sosial-ekonomi, dan warisan budaya
5. --- Penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan
6. --- Perincian skenario pembangunan yang dipilih
7. --- Perumusan rencana induk pariwisata terpadu
8. --- Peningkatan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan

Keterpaduan Penyusunan ITMP

1. --- Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan
2. --- Meningkatkan kualitas jalan yang relevan dan aksesibilitas layanan dasar pariwisata
3. --- Mempromosikan partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata
4. --- Meningkatkan lingkungan yang mendukung untuk investasi swasta dan pemasukan bisnis di bidang pariwisata

Prioritas Penyusunan ITMP di Tiga Destinasi

P. Lombok



Destinasi Wisata Utama

- 📍 Kepulauan Gili
- 📍 Pantai Senggigi
- 📍 KEK Mandalika
- 📍 Taman Nasional Rinjani



Pulau Lombok memiliki populasi penduduk sekitar 3,3 juta penduduk dengan luas pulau 4.379 km². Daya tarik wisata di Pulau Lombok, khususnya di Kepulauan Gili dan Senggigi adalah wisata bahari, seperti pantai dan tujuan untuk menyelam. Saat ini sedang dilakukan pembangunan hotel skala besar oleh ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) di Mandalika.

danau toba



3 Kawasan Prioritas

- 📍 Parapat (Kec. Girsang Sipangan Bolon) sebagai pintu utama menuju Pulau Samosir, sekaligus fokus pengembangan infrastruktur wisata.
- 📍 Pulau Samosir, khususnya Kecamatan Simanindo dan Pangururan (desa wisata) memiliki atraksi seperti Kursi Batu Raja Siallagan dan Makam Raja Sidabutar. Selain itu terdapat Desa Ambarita yang memiliki budaya adat Batak yang kental, Pantai Parbaba, Pemandian Air Panas di Gubung Gunung Pusuk Buhit, dan desa wisata Tuktuk.
- 📍 Kecamatan Balige, Terdapat Bandara Silangit, Bandara terdekat menuju ke Danau Toba. Selain itu terdapat Museum yang menawarkan beragam model arsitektur Batak.

borobudur



3 Atraksi Utama

Kawasan Borobudur dan sekitarnya, direncanakan dengan visi "*The Capital Buddhist Heritage in The World*" memiliki 3 atraksi utama, yaitu :

- 📍 Kawasan Borobudur, termasuk Candi Borobudur sebagai UNESCO *World Heritage Site*, Candi Pawon dan Candi Mendut, serta desa-desa adat di sekitarnya.
- 📍 Candi Prambanan dan Ratu Boko (UNESCO *World Heritage Site*), Candi Sewu, Candi Buhrah dan Candi Lumbung.
- 📍 Yogyakarta dengan atraksi utama Kraton Kesultanan Yogyakarta sekaligus museum, Taman Sari, dan Kawasan Wisata Belanja Malioboro.

Rencana Penyusunan Penanganan Palu & Sekitarnya

Rencana Kawasan Relokasi Penduduk Terdampak Gempa



Kawasan Relokasi Duyu



Rencana Penanganan Infrastruktur



Rencana Tanggul Laut



Rangkaian Acara Harbak PU di Gedung Sate



Upacara berkecemasan menyambut Hari Sate RI ke-7 berlangsung di Lapangan Gribang Sari, Bandung (14/12/2018). Hari Sate RI tahun 2018 ini mengusung tema "Sate PUH Konsep Intelektual Mengembangkan Bangsa". Menteri PUPH, Saiful Hudaibuljoni, berinteraksi dengan masyarakat dan berdiskusi dengan mahasiswa di acara Debat Cipta Karya, Saiful H. Saiful Hudaibuljoni. Upacara dihadiri oleh para pejabat tingkat nasional, perwakilan dari perguruan tinggi di seluruh PUPH. Sate sate dibagikan ke seluruh bangsa ini pada upacara yang berlangsung di Lapangan Gribang Sari Bandung.



OUTBOND

Meningkatkan Soliditas Pegawai BPW



Guru Besar dan jajaran Lembaga Penelitian, Badan Pengembangan, Inovasi dan Masyarakat (BPIM), Biro Administrasi, Hubungan Umum dan Perencanaan (BUPP) menggelar "Optimalisasi Kinerja Pegawai Melalui Kolaborasi Selain Mandibung" Layanan Terpadu (LWT) Universitas PUPP di Bogor, Jawa Barat, (7-8/12).

BPIW Turut Meriahkan Harbak PUPR ke-73



Suasana senam bersama di halaman kantor Kementerian PUPR.



Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti saat berada di panggung utama setelah senam bersama.



Senam pagi bersama yang dilaksanakan di halaman kantor Kementerian PUPR.



Sejumlah pegawai antusias mengikuti instruktur senam.

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum (Harbak PU) ke-73, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut memeriahkan dengan mengikuti kegiatan senam pagi bersama.

*Segenap Pimpinan dan Pegawai
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mengucapkan:*

**Selamat
Tahun Baru
2019**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**



Buletin Sinergi ini dapat didownload melalui:
bpiw.pu.go.id/publication/bulletin



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR

